

PENGARUH *OFFICE CHANNELING (OC)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, *NON-PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN *BI RATE* TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH (UUS) TAHUN 2014-2019

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh:

SHOVIA INDAH FIRDIYANTI

1605036044

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Dr. H. Muchlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

Perum Mangkang Indah RT.11 RW.20 No.407 Kelurahan Wonsari, Kec. Ngaliyan,
Semarang

Arif Afendi, S.E., M.Sc.

NIP. 19850526 201503 1 002

Poncoharjo RT.03 RW.02 Kec.Bonang Kab.Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Shovia Indah Firdiyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami teliti dan mengadakan perbaikan selama proses bimbingan, bersama ini kami kirimkan nilai bimbingan saudara :

Nama : Shovia Indah Firdiyanti

NIM : 1605036044

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

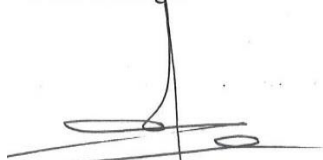
Judul Skripsi : "Pengaruh *Office Channeling* (OC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan BI *Rate* Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muchlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing II



Arif Afendi, S.E.M.Sc.

NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raya Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. 024-7606405 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi : Shovia Indah Firdiyanti
NIM : 1605036044
Judul Skripsi : “Pengaruh *Office Channeling (OC), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF)*, dan *BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019*”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020.

Semarang, 28 Januari 2020

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

Sekretaris Sidang

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji I

Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing II

Arif Efendi, S.E., M.Sc.
NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (berusaha); dan carilah karunia Allah (mencari rizki yang halal) dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Jumuah [62] : 10)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Mundofir dan Ibu Sri Darmanti) yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian doanya, serta selalu memberi dukungan, motivasi, semangat dan kasih sayang yang teramat besar. Terimakasih untuk cinta kasih sayang kalian.
2. Adik kandung tersayang (Muhammad Syukron Fitra Firdian) yang selalu memberikan doa, semangat, dan menghibur di setiap suasana.
3. Seluruh keluarga besar baik dari pihak Bapak maupun Ibu, terima kasih atas iringan doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat penulis yang selalu bersama saat keadaan sulit dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Januari 2020

Deklarator,



Shovia Indah Firdiyanti

NIM. 1605036044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ ā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ ā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

النَّاسِ	Ditulis	Annasi
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكمه	Ditulis	Hikmah
بركه	Ditulis	Berkah
هديه	Ditulis	hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- [◌] -----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
----- _◌ -----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
----- [◌] -----	Dhammah	Ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
اجر	Kasroh	Ditulis	<i>ajiro</i>
سكر	Dhommah	Ditulis	<i>sakuru</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جا هلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3. Dhammah + wawu mati يعلمون	Ditulis	<i>ya'lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بيع	Ditulis	<i>baia</i>
2. Fathah + wawu mati فوق	Ditulis	<i>fauqo</i>

ABSTRACT

The research aims to determine of the effect of Office Channeling, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), and BI Rate on the total assets of sharia business units in 2014-2019.

The research approach used is a quantitative. The data used is data in the form of time series obtained from sharia banking statistics reports published by the Financial Services Authority and BI Rate from Indonesian Banks. The population in this study are all sharia business units in Indonesia. The sample used was 60 data from October 2014 to September 2019. This study used multiple regression analysis that was processed through the SPSS 16.0 program.

The results of hypothesis testing show that partially office channeling has a positive and significant effect with a regression value of 91,444. FDR has a negative but not significant effect with a regression value of -224,687. NPF has a negative and significant effect with a regression value of -11559,375. And the BI Rate has a positive and significant effect with a regression value of 9270,970. Of the four independent variables shows that the magnitude of the effect largest variable is NPF. Therefore the bank must maintain the quality of the NPF so as not to interfere.

Keywords: *Total Assets, Office Channeling (OC), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), and BI Rate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui besaran pengaruh *Office Channeling* (OC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *BI Rate* Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data dalam bentuk time series diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan *BI Rate* dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 60 data periode Oktober 2014 sampai September 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah melalui program SPSS 16.0.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar 91,443, FDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dengan nilai regresi sebesar -224,687, NPF berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar -11559,375, serta *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar 9270,970. Dari keempat variabel independen menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel terbesar adalah NPF, karena itu pihak bank harus menjaga kualitas NPF agar tidak mengganggu.

Kata Kunci: Total Aset, *Office Channeling* (OC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *BI Rate*.

KATA PENGANTAR

Alhamdhuilillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Office Channeling* (OC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *BI Rate* Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penghormatan dan kebanggaan, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE, M.Si. selaku Ketua Progam Studi dan Ibu Muyassarah, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Progam Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
4. Ibu Hj. Dra Nur Huda, M.Ag. selaku dosen wali studi yang senantiasa memberikan bantuan, semangat dan motivasi.
5. Bapak Dr. H. Muchlis, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing,

mengarahkan, memberi masukan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Progam Studi dan Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak dan Ibu tercinta, adikku beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan selama kuliah sampai penulisan skripsi ini
9. Seluruh sahabat dan teman terdekat yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016, terutama keluarga besar S1 Perbankan Syariah A yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
11. Seluruh teman-teman di UIN Walisongo Semarang baik dalam aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan bagi mereka semua dengan rahmat yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 06 Januari 2019
Penyusun,

Shovia Indah Firdiyanti
NIM. 1605036044

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS).....	12
2.1.2 Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah.....	13

2.1.3	Total Aset	15
2.1.4	Office Channeling (OC).....	21
2.1.5	Financing To Deposit Ratio (FDR).....	24
2.1.6	Non-Performing Financing (NPF)	27
2.1.7	BI Rate	30
2.2	Kerangka Berfikir	33
2.3	Hipotesis	33
METODOLOGI PENELITIAN		34
3.1	Jenis dan Sumber Data	34
3.2	Metode Pengumpulan Data	34
3.3	Populasi dan Sampel	35
3.4	Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	37
3.5	Teknik Analisis Data	40
1.	Analisis Deskriptif	40
2.	Uji Asumsi Klasik	40
3.	Analisis Regresi Berganda	43
4.	Uji Hipotesis	43
HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.2	Statistik Deskriptif.....	53
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	58
4.3.1	Uji Normalitas Data	58
4.3.2	Uji Autokorelasi	59
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	60
4.4	Hasil Uji Hipotesis	61
1.	Analisis Regresi Berganda	61
2.	Koefisien Detrerminasi (R^2).....	62
3.	Penafsiran Uji t (Uji Parsial)	63
4.	Penafsiran Uji F (Uji Simultan)	64
4.5	Interpretasi Data	64

4.5.1	Pengaruh <i>Office Channeling</i> (OC) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah	64
4.5.2	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah	65
4.5.3	Pengaruh <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah	66
4.5.4	Pengaruh <i>BI Rate</i> Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah ...	67
KESIMPULAN DAN SARAN		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	70
5.2.1	Bagi Unit Usaha Syariah	70
5.2.2	Bagi Akademik	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN.....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan UUS 2014-2019.....	3
Tabel 2.3 Daftar Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Total Aset UUS di Indonesia.....	53
Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Variabel Office Channeling.....	54
Tabel 6.4 Statistik Deskriptif Variabel FDR.....	55
Tabel 7.4 Statistik Deskriptif Variabel NPF.....	56
Tabel 8.4 Statistik Deskriptif Variabel BI Rate.....	57
Tabel 9.4 Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov.....	59
Tabel 10.4 Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 11.4 Hasil Uji Hipotesis.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 2.3 Pengambilan Keputusan Uji t.....	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Total Aset UUS 2014-2019.....	4
Grafik 2.1 Perkembangan Office Channeling UUS 2014-2019.....	5
Grafik 3.1 Perkembangan FDR UUS 2014-2019.....	6
Grafik 4.1 Perkembangan NPF UUS 2014-2019.....	7
Grafik 5.1 Perkembangan BI Rate 2014-2019.....	8
Grafik 6.4 Uji Normalitas Data.....	58
Grafik 7.4 Uji Heterosdekastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	76
Lampiran 2 Pengolahan Data SPSS.....	77
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Bank Syariah adalah salah satu instrumen ekonomi yang kemunculannya diyakini para pakar Islam mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank syariah dijalankan dengan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah satu-satunya bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.¹ Perbankan syariah yang berkomitmen tidak menggunakan sistem bunga mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan masyarakat Indonesia hingga kemudian perkembangannya diikuti oleh bank-bank baru yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, jenis perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan dan memperkuat perbankan syariah. Regulasi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah terdapat konsep *Islamic Windows* dimana Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).² Maka secara tidak langsung *dual banking system* diberlakukan di Indonesia dengan diterapkannya sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil.

¹ Luhur Prasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir: Vol. 12, No. 1, Mei 2012, h. 46.

² Sulasi Rongiyati, *Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah*, Negara Hukum: Vol.6, No.1, Juni, 2015. h. 66.

Tabel 1.1
Perkembangan UUS 2014-2019

Tahun	Jumlah UUS
2014	22
2015	22
2016	21
2017	21
2018	20
2019	20

Sumber : Data OJK yang sudah diolah

Tabel 1.1 menunjukkan Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2016 mengalami pengurangan yaitu PT Bank Aceh Syariah dan di tahun 2018 yaitu PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang keduanya telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini diakibatkan oleh adanya regulasi UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan terhadap Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah dan nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlaku undang-undang dibuat, maka Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan (*Spin-Off*) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.³ Sehingga Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih tersisa pada tahun 2019 diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank Maybank Indonesia, PT bank CIMB Niaga, PT Bank OCBC NISP, PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD

³ Lihat Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

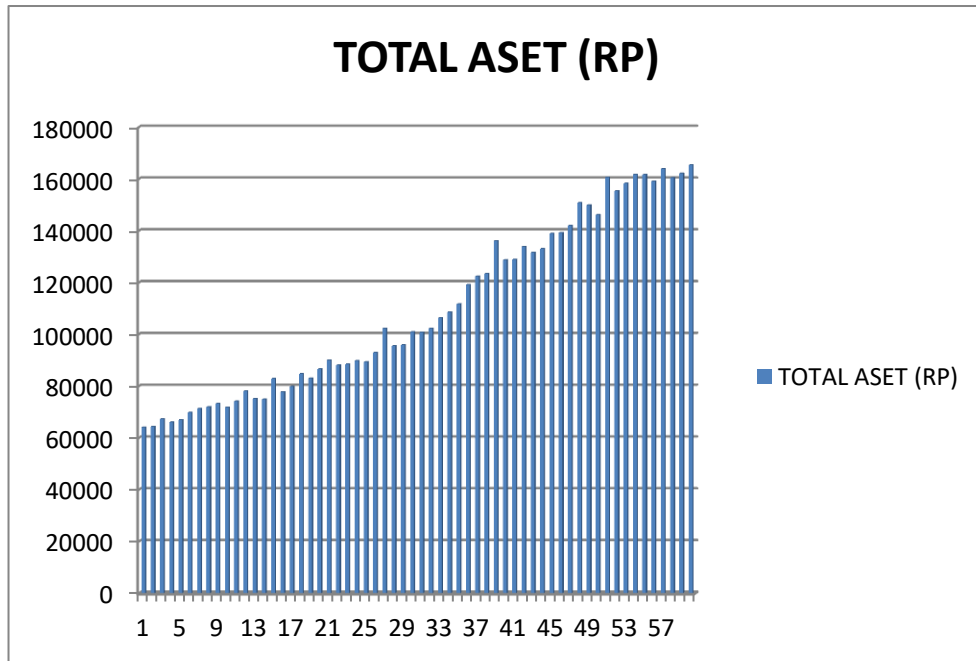
Dilihat dari konversi dan *spin-off* saat ini perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung penuh oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung kepada induknya. Sehingga bank syariah akan semakin fokus, cepat, dan fleksibel dalam beroperasi serta dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan produk dan bisnis. Namun hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Hal ini karena berkemungkinan menjadi bank syariah yang tidak bisa bersaing di pasar sehingga menjadi bank baru yang tidak sehat. Tetapi meskipun begitu, para Unit Usaha Syariah (UUS) harus meningkatkan total aset nya semaksimal mungkin agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Serta peningkatan total aset UUS secara keseluruhan juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional bersama BUS dan BPRS.

Semakin besar asset yang dimiliki bank syariah, maka semakin bagus kinerja yang telah dilakukan baik dari segi penghimpunan ataupun dari pembiayaan. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah, yaitu dari faktor internal yang meliputi indikator rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, *Office Channeling*, jumlah DPK, jumlah kantor, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, serta tingkat bagi hasil. Sedangkan faktor eksternal meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, BI rate, dan jumlah uang yang beredar (JUB).⁴

⁴ Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan: Vol.3, No.3, 2016. h. 250.

Grafik 1.1

Perkembangan Total Aset UUS 2014-2019



Sumber : Data OJK yang sudah diolah

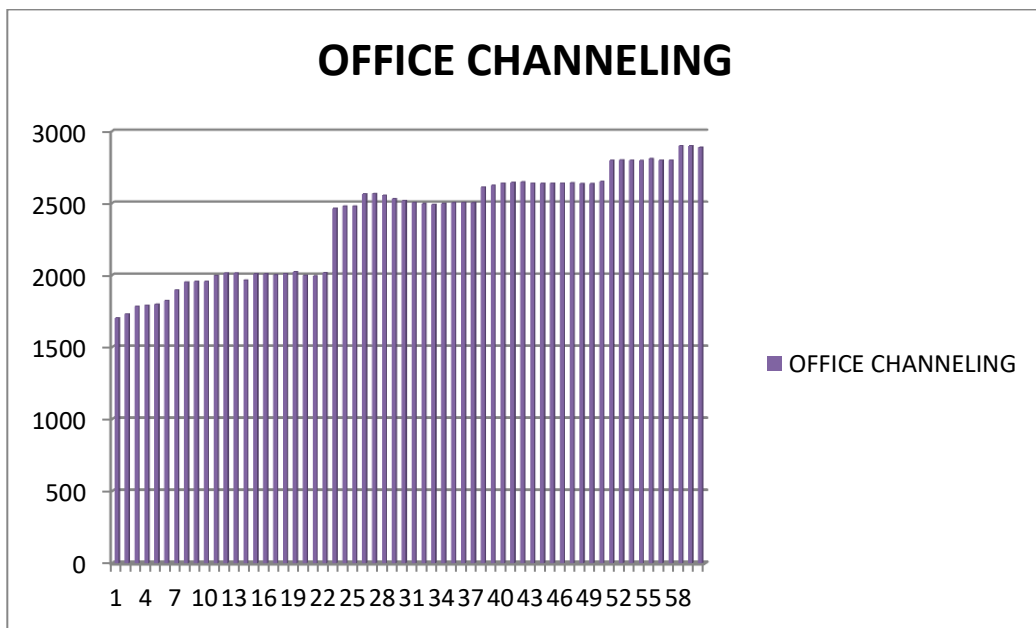
Grafik 1.1 menunjukkan bahwa telah terjadi pergerakan fluktuatif pada total aset Unit Usaha Syariah dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan September 2019. Hal ini tentu akan menjadi perhatian selain sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan, peran Unit Usaha Syariah (UUS) juga ikut berkontribusi dalam penilaian perbankan syariah secara nasional terutama dalam hal penilaian total asset.

Salah satu hambatan bagi bank syariah adalah minimnya jaringan yang ada. Sehingga, banyak masyarakat yang ingin bertransaksi di bank syariah jadi mengurungkan keinginannya tersebut. Tetapi Bank Indonesia telah mengantisipasi sebelum UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikeluarkan dengan mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Pada peraturan tersebut terdapat materi penerapan layanan syariah atau *office channeling* bagi bank-bank syari'ah terutama bagi Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di

Indonesia. Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah serta pola *Office channelling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah.⁵ Dengan sistem ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan meningkatnya pangsa pasar diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan asset Unit Usaha Syariah (UUS).

Grafik 2.1

Perkembangan *Office Channeling* UUS 2014-2019



Sumber : Data OJK yang sudah diolah

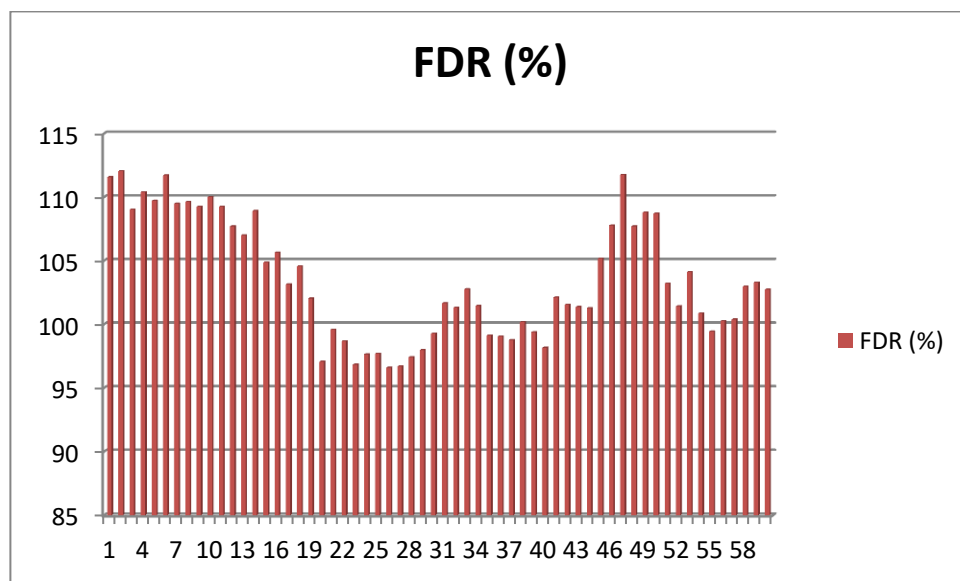
Grafik 2.1 terlihat bahwa terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dari bank konvensional yang telah menerapkan *office channeling*. Terdapat penelitian yang berbeda mengenai peran *office channeling* terhadap total asset. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairienisa Rohaya (2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling*

⁵ Teti Rahmawati, *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling*, JRKA: Volume 1 Isue 2, Agustus, 2015: 71 – 89, h. 75.

berpengaruh terhadap total asset. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror (2011) mengatakan bahwa *office channeling* tidak berpengaruh terhadap total asset. Selain dari segi jaringan kantor, faktor tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan atau Financing to Deposit Ratio (FDR) dan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) diyakini juga menjadi salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam total aset Unit Usaha Syariah (UUS).

Grafik 3.1

Perkembangan FDR UUS 2014-2019



Sumber : Data OJK yang sudah diolah

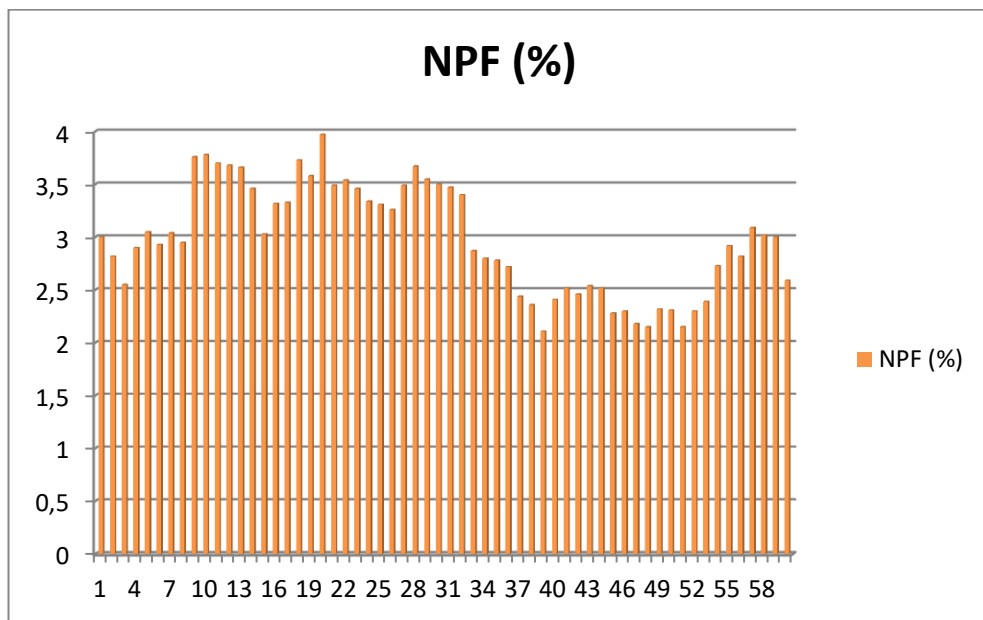
Pada grafik 3.1 terlihat bahwa jumlah rasio FDR juga terjadi pergerakan yang fluktuatif dari bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Jika total rasio FDR semakin tinggi maka ini menandakan bahwa UUS di Indonesia memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi karena jumlah FDR yang kian meningkat.⁶ Terdapat penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito

⁶ Zakaria Arrazy, *Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, h .07.

Mohammad (2018) menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap total asset bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap total asset perbankan syariah di Indonesia.

Dengan melihat rasio *Non-Performing Financing* (NPF), dapat diketahui seberapa besar pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan seluruh pembiayaan yang telah diberikan oleh unit usaha syariah. Yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Grafik 4.1
Perkembangan NPF UUS 2014-2019



Sumber : Data OJK yang sudah diolah

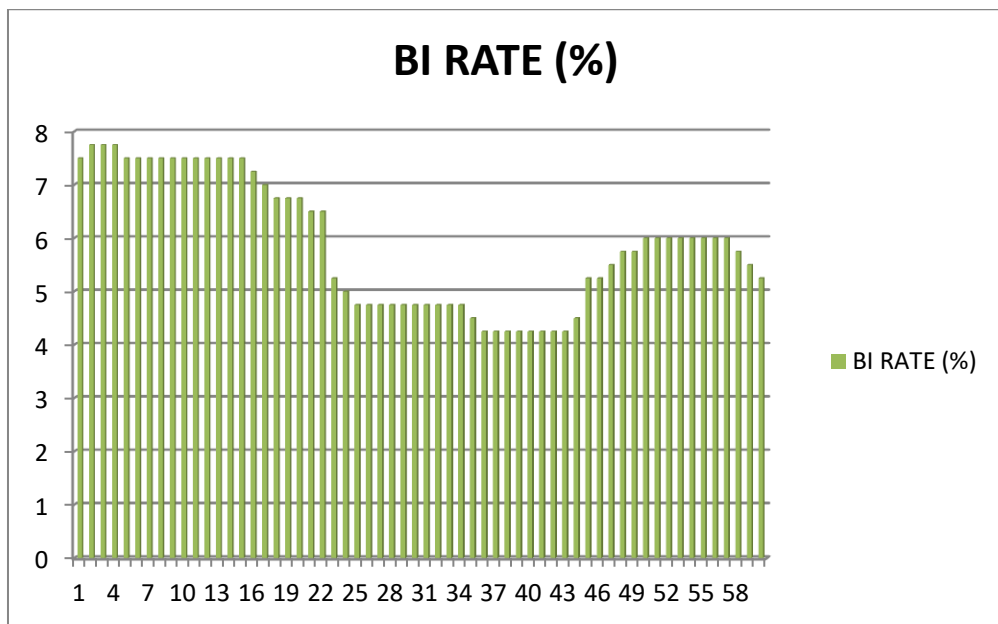
Terlihat bahwa jumlah NPF pada grafik 4.1 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Besarnya NPF yang dihadapi oleh bank akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Oleh karena itu besaran jumlah NPF akan berpengaruh negatif terhadap total aset. Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018) menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap total asset bank syariah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror (2011) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset perbankan syariah.

Kondisi internal yang dialami perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang cenderung berfluktuasi. Salah satu faktor eksternal dari makro ekonomi yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah adalah BI *rate* atau suku bunga Bank Indonesia. Terlebih lagi Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan anak dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang menggunakan sistem bunga. Fakta diatas menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Grafik 5.1

Perkembangan BI Rate 2014-2019



Sumber : Data BI yang sudah diolah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Tetapi penelitian yang

dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Arsy dan Imron Mawardi (2016) menyatakan bahwa faktor eksternal yang meliputi Inflasi, Pertumbuhan GDP, BI Rate dan Jumlah Uang Yang Beredar (JUB) tidak mempengaruhi total aset bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas pertumbuhan total aset unit usaha syariah serta faktor yang mempengaruhinya menyebabkan kontribusi aset unit usaha syariah bagi perkembangan perbankan syariah masih membutuhkan upaya untuk dapat meningkatkan asetnya. Dari segi faktor yang mempengaruhi total asset, pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat kesenjangan penelitian (*Research Gap*) sehingga masalah penelitian dalam hal ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini sangatlah penting bagi perbankan syariah terutama pada unit usaha syariah agar total aset tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Office Channeling, Financing To Deposit Ratio (FDR) Non-Performing Financing (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Office Channeling* (OC) terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)?
2. Seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)?
3. Seberapa besar pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)?
4. Seberapa besar pengaruh *BI Rate* terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh *Office Channeling* terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)
4. Untuk mengetahui besaran pengaruh *BI Rate* terhadap total aset Unit Usaha Syariah (UUS)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti :
 - a. Menambah wawasan tentang cara penulisan yang baik dan benar.
 - b. Sebagai sarana melatih diri untuk berfikir ilmiah dan menjadi alat untuk mengimplementasikan teori yang disampaikan saat kuliah.
 - c. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai *Office Channeling*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* dan *BI Rate* serta perkembangan Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Bagi Fakultas dan Universitas :

Sebagai bahan evaluasi atau tolak ukur penulisan mahasiswa untuk kemajuan akademik di tahun berikutnya.
3. Bagi Bank Syariah
Sebagai acuan dalam meningkatkan total aset manajemen perusahaan perbankan syariah terutama bagi Unit Usaha Syariah (UUS).
4. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu solusi kepada masyarakat yang ingin bertransaksi di bank syariah tetapi terkendala karena tidak adanya bank syariah, maka dapat memanfaatkan layanan syariah berupa *office channeling* untuk melakukan transaksi syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan teori terkait dengan Unit Usaha Syariah (UUS), Total Aset, Office Channeling, Financing To Deposit Ratio (FDR), Non-Profit Financing (NPF), BI Rate, serta mencakup kerangka berfikir dan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi data penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Office Channeling (OC), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS)

Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁷ Terkait dengan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.⁸

Jadi dapat dikatakan bahwa Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari induknya yaitu bank konvensional. Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi Unit Usaha Syariah tetap terpisah dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh tercampur dengan transaksi konvensional sehingga Unit Usaha Syariah memberikan laporan keuangan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya. Sama halnya dengan Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah, Unit Usaha Syariah menggunakan prinsip-prinsip bank syariah yakni tidak menggunakan

⁷ Itang, *Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*, Alqalam: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 25.

⁸ Rongiyati, *Pengembangan...*, h. 67-68.

transaksi spekulatif (maysir), ketidakjelasan jual beli atas suatu barang (gharar), jual beli bersyarat (mengandung unsur ribawi) serta tidak melakukan transaksi dengan cara yang bathil.

Adapun salah satu ayat yang menerangkan tentang bathil adalah QS. Al-Nisa :29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat ini mengandung maksud bahwa Allah melarang kita untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2.1.2 Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Akad salam, Akad isthisna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiyyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambilan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak ada pertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁹

2.1.3 Total Aset

Aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu akan datang yang diharapkan akan memberikan manfaat usaha di masa depan.¹⁰ Bagi manajemen, total aset sangatlah penting dikarenakan aset menjadi tolak ukur kinerja dan prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding prestasi suatu perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain, sehingga dapat menjadi dasar keputusan manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkannya.

⁹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009, h. 51-53.

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, h. 24.

Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economics of scale* yang dimiliki oleh bank. Selain itu total aset merupakan ukuran *strategic positioning map* yaitu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha. Pada laporan neraca, aktiva disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya (tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan). Aktiva atau Aset dibagi menjadi¹¹ :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*)

Digunakan untuk menyatakan kas dan sumber-sumber lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai, dijual maupun dipakai habis dalam kurun waktu selama 1 tahun. Contoh : kas, penempatan pada bank Indonesia, surat berharga, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima.

2. Investasi (Penyertaan) atau Investasi Jangka Panjang

Bentuk penyertaan jangka panjang untuk menguasai perusahaan lain. Contoh : investasi berupa saham, investasi dalam obligasi (surat hutang), dan surat berharga lainnya, investasi dalam bentuk dana yang akan digunakan pada masa mendatang.

3. Aktiva Tetap (*Fixed Assets*)

Aktiva berwujud yang digunakan untuk alat melakukan operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun serta mengalami penyusutan kecuali tanah. Contoh : tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya.

4. Aktiva tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aktiva yang tidak berwujud yang berupa hak-hak istimewa dalam menghasilkan pendapatan. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek dan lainnya.

¹¹ Sujarweni, Analisis..., h. 24-25.

5. Aktiva lain-lain (*Other Assets*)

Aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Contohnya : beban yang ditanggungkan, piutang kepada pemegang saham dan lainnya.

Berikut ini adalah pos-pos dalam neraca (laporan keuangan) yang tergolong aset pada unit usaha syariah, yaitu :

1. Kas

Pada pos ini dilaporkan seluruh uang kartal yang ada dalam kas bank berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, termasuk uang kertas dan uang logam yang masih berlaku milik bank pelapor.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan Bank Indonesia terdiri dari Giro wadiah pada Bank Indonesia berupa Giro, SBIS (Surat Bank Indonesia Syariah), FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah) dan lainnya.

3. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank syariah lainnya dalam bentuk wadiah, deposito berjangka, setoran jaminan, dana pelunasan sukuk dan lainnya.

4. Surat Berharga yang Dimiliki

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

a. Diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank

b. Diterbitkan oleh bank lain

5. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad musharabah dan akad musyarakah terdiri dari pembiayaan bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank dan pembiayaan bagi hasil kepada bank lain.

a. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan musharabah.

b. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan musyarakah.

6. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad murabahah, qardh, isthisna. Terdiri dari piutang kepada pihak ketiga bukan bank dan piutang kepada bank lain.

a. Piutang Murabahah

Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggung yang dapat direalisasikan dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang murabahah berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

b. Piutang Qardh

Piutang qardh disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

c. Piutang isthisna

Piutang isthisna disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai

dengan kualitas piutang istimewa berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

7. Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk piutang sewa

Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk piutang sewa termasuk piutang sewa pihak ketiga bukan bank dan pembiayaan sewa (ijarah) termasuk piutang sewa kepada bank lain.

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan objek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

8. Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya yaitu berupa Spot Forward, Reverse Repo, Tagihan Akseptasi).

9. Penyertaan

Penyertaan adalah investasi dana bank dalam bentuk saham pada lembaga keuangan syariah lainnya sehingga bank syariah ikut menjadi pemilik lembaga keuangan syariah tersebut seperti Bank Syariah atau Bank Pembiayaan Syariah.

10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Yaitu berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif pada pembiayaan unit usaha syariah.

11. Salam

Pembiayaan salam dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan salam.

12. Aset Istimewa dan Penyelesaian (setelah dikurangi termin istimewa)

Aset istimewa dalam penyelesaian adalah aset istimewa yang masih dalam proses pembuatan. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aset istimewa, maka :

- a. Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra akad diakui sebagai aset istimewa dalam penyelesaian saat akad ditandatangani.
- b. Biaya istimewa diakui sebagai aset istimewa dalam penyelesaian pada saat terjadinya
- c. Biaya istimewa paralel diakui sebagai aset istimewa dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.

13. Aset Tetap dan Inventaris

Terdiri dari total harta aset tetap dan inventaris yang dimiliki unit usaha syariah.

14. Rupa-rupa Aset

Terdiri dari biaya dibayar dimuka, harta jaminan pembiayaan yang diambil alih, persediaan alat tulis kantor, setoran jaminan dan biaya ditangguhkan.

Pertumbuhan suatu bank sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur. Bank Indonesia menjadikan tujuh hal sebagai indikator utama perbankan yaitu¹² :

1. Total Aset, yaitu keseluruhan harta yang dimiliki oleh perbankan
2. Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan
3. Earning, atau pendapatan perbankan
4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu Rasio kecukupan modal
5. *Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL), presentase jumlah kredit atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan
6. *Return On Asset* (ROA), presentase pendapatan terhadap aset perbankan.

¹² Yuria Prathiwi Cleopatra, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, No.1, 2008.

7. *Financing to Deposit Ratio (FDR)/Loan Deposit Ratio(LDR)* atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu indikator pertumbuhan suatu bank dapat diukur dari total aset yang dimiliki dalam dan kurun waktu periode tertentu. Pertumbuhan total Aset menurut Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016) dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi indikator rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, *Office Channeling*, jumlah DPK, jumlah kantor, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, serta tingkat bagi hasil. Sedangkan faktor eksternal meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, *BI Rate*, dan jumlah uang yang beredar (JUB).

2.1.4 Office Channeling (OC)

Kata *Office Channeling* berasal dari bahasa inggris yaitu *office* yang berarti kantor dan *channeling* berasal dari kata *channell* yang berarti jaringan. *Office channeling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional.¹³ Pada PBI No.8/3/PBI/2006 yang mengatur tentang layanan syariah yang kemudian disebut dengan *office channelling* merupakan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional, dengan kata lain cabang bank konvensional yang telah memiliki UUS diperbolehkan menerapkan layanan syariah. Sedangkan pada PBI No.11/10/PBI/2009 layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang dan atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.¹⁴

¹³ Hairienisa Rohaya', *Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling*, Jurnal Ekonomi Islam: Vol. II, No.2, Desember 2008, h. 196.

¹⁴ Tim BI, *Peraturan BI No.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009, h. 17.

Landasan hukum adanya *office channelling* mengacu peraturan BI No.11/10/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan tentu setelah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) ulama Indonesia yang mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. Disisi regulasi, mengenai rencana bank konvensional yang ingin membuka layanan Syariah diwajibkan mencantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari BI. Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menerapkan *office channeling* adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah.

Ketua DSN Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional seperti *office channelling* tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi *sharia compliance*. Prinsipnya, tidak jauh berbeda dengan masalah pemanfaatan ATM bank konvensional oleh nasabah bank syariah.¹⁵ Dengan adanya teknologi dalam sistem perbankan, dana yang masuk ke Bank yang membuka *office channelling* sudah benar-benar terpisah.

Office channeling dapat dilaksanakan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional dengan persyaratan sebagai berikut¹⁶ :

1. Lokasi *office channeling* berada dalam satu wilayah dengan kantor cabang syariah induknya, yaitu :
 - a. Dalam satu wilayah provinsi
 - b. Dalam satu wilayah kerja kantor BI melebihi satu wilayah provinsi
 - c. Menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank lainnya

¹⁵ M. Nadrattuzaman Hosen, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, 2007, Cet.ke-1, h. 43.

¹⁶ Muhammad Syarif, *Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2010, h. 16-17.

- d. Didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai
2. Kegiatan layanan syariah wajib dicatat secara otomatis dan *online* dengan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari kerja yang sama.
3. Dengan menggunakan pola kerjasama antar kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
4. Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
5. Memiliki pencatatan dan pembukaan terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
6. UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan syariah dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
7. Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logi iB pada kantor UUS yang bersangkutan, ditempat yang jelas yang mudah dilihat oleh masyarakat.
8. Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan kegiatan layanan syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada BI secara semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
9. Laporan sebagaimana dimaksud di atas poin (8) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

Kebijakan *office channelling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak perlu membuka kantor cabang syariah baru sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang perekonomian nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Perluasan jaringan kantor diperkirakan memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan aset menggambarkan perubahan total aset yang dimiliki

perusahaan apakah mengalami peningkatan atau penurunan dengan total aset tahun sebelumnya.¹⁷

Pelayanan *office channelling* ini juga diprediksi akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah dimasa depan. Semakin mudah masyarakat mendapat akses layanan perbankan syariah, maka diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hairiennisa Rohaya (2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total Asset secara signifikan setelah diberlakukan *office channeling* pada tahun 2006. Selain peningkatan total aset, DPK dan jaringan kantor perbankan syariah juga ikut mengalami kenaikan setelah diterapkan *office channeling*.

Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *office channeling* dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh positif.

2.1.5 Financing To Deposit Ratio (FDR)

Financing Deposit to Ratio merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dari masyarakat).¹⁸ Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah dan pihak-pihak terkait. Tingkat pembiayaan adalah indikasi yang menunjukkan kinerja bank sebagai lembaga keuangan intermediasi. Kinerja ini dapat dilihat dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah atau FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan

¹⁷ Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani, *Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2012-2016*, Jurnal Akuntansi UNESA: vol. 6 No.3, 2019, h. 03.

¹⁸ Arrazy, *Pengaruh...*, h. 33.

membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan.¹⁹ Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio ini disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, dan merupakan sumber pendapatan utama bank. Tetapi semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Tujuan penting dari perhitungan rasio ini adalah mengetahui serta melakukan penilaian seberapa jauh kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁰

FDR memberikan gambaran optimalisasi perbankan syariah untuk mengembangkan sektor riil, karena semakin besar FDR artinya bank syariah semakin optimal dalam menyalurkan DPK yang ada pada bank dalam bentuk pembiayaan. Namun Bank Indonesia membatasi rasio FDR dikarenakan jika FDR terlalu tinggi akan membahayakan likuiditas bank. Bank Indonesia menetapkan rasio FDR sebagai berikut²¹ :

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih, berarti likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- b. Untuk rasio FDR kurang dari 110%, berarti likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal tersebut dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan, maka bank

¹⁹ Diana Djuwita, Assa Fito Mohammad, *Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia*, Al-Amwal: Vol.8, No.1 Tahun 2018, h. 286.

²⁰ Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016*, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, 2017, h. 311.

²¹ www.bi.go.id

memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bank dengan tingkat likuiditas yang tinggi dikategorikan baik, akan tetapi jika kelebihan likuiditas menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan nilai Aset.²² Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika semakin tingginya FDR dimana kondisi likuiditas bank terancam dan tidak mampu menahan kerugian, maka pertumbuhan aset semakin menurun.

Pengendalian rasio FDR masih merupakan masalah yang dilematik bagi dunia perbankan. Jumlah FDR yang tinggi menandakan bahwa bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun keadaan ini berarti akan menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah. Sebaliknya saat FDR rendah posisi likuiditas bank baik, namun pada keadaan ini berarti bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.²³

Penyaluran DPK dalam bentuk pembiayaan belum tentu menghasilkan keuntungan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Aryani, Lukytawari Anggraeni, dan Ranti Wilasih yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014 mengatakan bahwa peningkatan FDR sebesar 1% akan meningkatkan volume NPF sebesar 0,006%. Hal ini terjadi karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan bank akan menimbulkan resiko

²² Irma Setyawati, *Determinan Pertumbuhan Total Asset dengan Pendekatan Variabel Spesifik Bank dan Pangsa Pasar Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Mediastima Tahun XXI: Nomor.2, 2015, h. 103.

²³ Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol.12 No.1 Juni 2014, h. 59.

pembiayaan yang sebanding.²⁴ Tingginya FDR bank syariah saat ini menyebabkan tingkat resiko pembiayaan dan risiko likuiditas bank syariah menjadi tinggi. Selain itu penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank syariah menjadi tinggi. PPAP yang tinggi ini akan memperkecil aset bank syariah.²⁵

Jadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang didukung oleh koefisien regresi antara FDR dan PTA sebesar -0,003, yang menunjukkan penurunan PTA sebesar 0,003 apabila terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan.

Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *financing deposit to ratio* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

2.1.6 Non-Performing Financing (NPF)

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabahnya atau sering disebut pembiayaan bermasalah. Rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah disebut juga dengan istilah *Ratio Non-Performing Financing* (NPF) yaitu digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank, khususnya untuk mengetahui proporsi pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah dimana mitra tidak dapat memenuhi pengembalian pembiayaan dan margin dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. NPF tidak hanya berupa risiko pembiayaan tetapi terdapat juga risiko investasi, karena pada beberapa akad dalam produk pembiayaan bank syariah ada yang

²⁴ Yulya Aryani, Lukytawari Anggraeni, Ranti Wilasih, *Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Al-Muzara'ah: Vol.4, No.1, 2016. h. 53.

²⁵ Arrazy, *Pengaruh...*, h. 7.

menggunakan mekanisme investasi seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.²⁶ Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank syariah. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF yang wajar adalah kurang dari sama dengan (\leq) 5% dari total pembiayaan yang diberikan. Rumus NPF adalah :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besaran NPF sangatlah penting bagi kelangsungan usaha dalam sektor perbankan dan menjadi salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih) dan solvabilitas (modal berkurang).²⁷ Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu²⁸ :

1. Faktor Internal

Faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor - faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kenyataannya telah banyak berbagai macam produk perbankan syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga ditemukan adanya permasalahan khususnya untuk

²⁶ Djuwita, *Pengaruh...*, h. 286.

²⁷ Solihatun, *Anailisis Non...*, Hlm. 58.

²⁸ Vanni, *Analisi...*, h. 309.

produk pembiayaan. Adanya NPF harus bisa diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang mempunyai tingkat NPF tinggi.

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala pembiayaan yang bermasalah adalah menentukan seberapa masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan baik di bank syariah maupun unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Restrukturisasi yang dimaksud juga harus memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*under special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).²⁹

Semakin tinggi rasio NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun

²⁹ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No.2 Juli-Desember 2018, h. 291-292.

bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank.³⁰ Keuntungan yang berkurang otomatis akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang. Bank dengan tingkat kualitas aset rendah memiliki jumlah aktiva produktif bermasalah yang sangat rendah dibandingkan dengan total aktiva produktif yang dimiliki.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018) dihasilkan bahwa variabel NPF memiliki t_{hitung} sebesar -3,814 lebih kecil daripada t_{tabel} 1,67866 dengan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini berarti NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015) dihasilkan nilai koefisien regresi NPF adalah -0,39 dan signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Yang menunjukkan setiap penurunan PTA sebesar 0,391 satuan apabila terjadi peningkatan NPF sebesar satu satuan.

Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *non-performing financing* dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

2.1.7 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut BI, pengertian suku bunga Bank Indonesia dalam *Inflation Targeting Framework* BI Rate merupakan suku bunga acuan BI dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.³¹ BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas

³⁰ Arrazy, *Pengaruh...* h. 48.

³¹ Adi Musharianto, *Suku Bunga Bank Indonesia, Financing To Deposit Ratio dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014. h. 110.

(liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.³²

Tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, menurut Hermawan Darmawi tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut³³ :

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi;
- b. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* ataukah pada *financial assets*;
- c. Tingkat suku bunga mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

Penetapan *BI Rate* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank Indonesia akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada diatas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Selain berperan dalam mengatasi inflasi, *BI Rate* juga berperan dalam mengatasi jumlah uang yang beredar (JUB) agar diperoleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Karena dengan menetapkan suku bunga yang tinggi masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank. Dalam permintaan uang di Indonesia selain dipengaruhi pendapatan nominal juga dipengaruhi suku bunga karena Indonesia belum seutuhnya menganut sistem syariah.

Kenaikan suku bunga acuan juga akan mempengaruhi kondisi perbankan syariah. Sebagai bagian dari perbankan nasional, perbankan syariah

³² Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2015, h. 95.

³³ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah: Vol. 01, No.01, Oktober 2014.h. 81.

juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang wajar. Saat ini, harga pembiayaan di bank syariah dirasakan oleh beberapa kalangan cukup tinggi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari uniknya prinsip operasional bank syariah yang berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal atau dana yang disetor akan berbagi risiko. Dalam kondisi *BI Rate* yang tinggi bank syariah tidak diperkenankan menaikkan tarif pembiayaan *murabahah* yang sudah berjalan karena maksimum pembiayaan sudah disepakati diawal akad. Pada kondisi ini bank syariah dihadapkan pada resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.³⁴

Dapat dikatakan bahwa peranan suku bunga juga ikut mempengaruhi total aset perbankan syariah. Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga tabungan bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka yang terjadi adalah total aset juga akan mengalami penurunan.³⁵

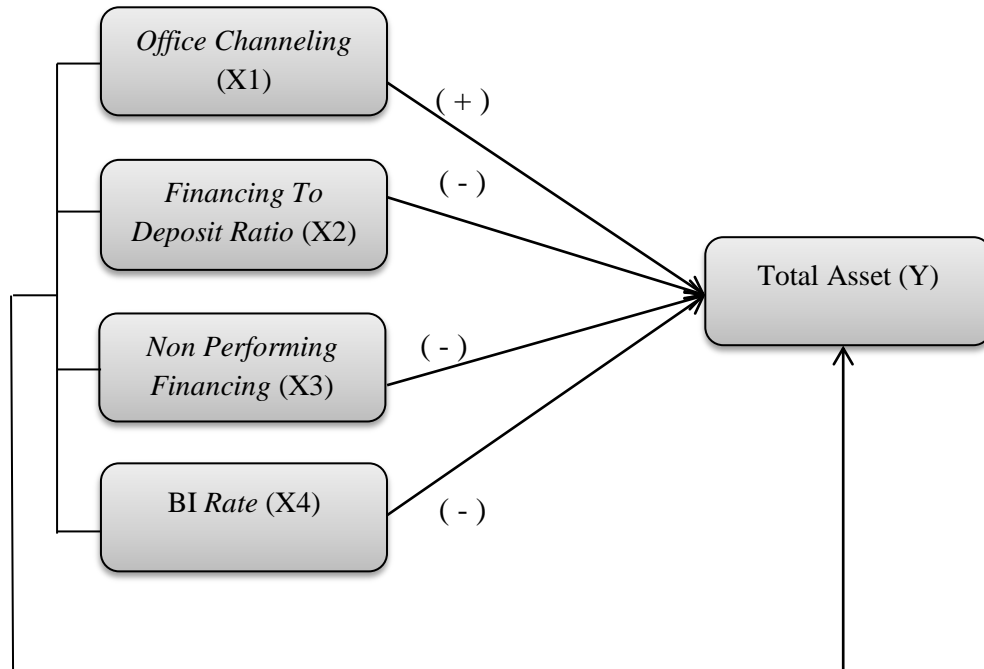
Pada penelitian yang dilakukan oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan hasil Variabel suku bunga BI memiliki t_{hitung} sebesar -4,114148 dengan probability sebesar $0,0002 < 0,05$ yang berarti suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *BI Rate* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

³⁴ Kristin, *Risiko...*, h. 98-99.

³⁵ Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah*, Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol.16. No.1, Maret 2019, h. 50.

2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



2.3 Hipotesis

- Ha₁ : Office Channeling berpengaruh positif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS)
- Ha₂ : Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS)
- Ha₃ : Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS)
- Ha₄ : BI Rate berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan skema hubungan dan pengaruh yang lebih dalam dari dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti yang berupaya untuk menciptakan hubungan sebab akibat.³⁶ Penelitian ini menguji Pengaruh *Office Channeling*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF) dan *BI Rate* sebagai variabel yang mempengaruhi (independen) Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen).

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan publikasi yaitu berupa laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data *BI Rate* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data yang dipakai adalah data bulanan periode 2014 sampai 2019 yang dipandang cukup mewakili kondisi unit usaha syariah di Indonesia pada saat itu dan indikator-indikator keuangan perbankan syariah pada periode tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan³⁷ :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cetakan ke-14, 2011, h.37.

³⁷ Sugiyono, *Metode...*, h. 137.

adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarakan melalui internet.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data sekunder berupa laporan keuangan bulanan statistik perbankan syariah yang diunduh melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id pada periode 2014-2019 dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) yaitu www.bi.go.id pada periode 2014-2019. Selain itu dilakukan pula studi kepustakaan (*library research*), dan mengkaji berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Penelitian ini memiliki populasi yaitu Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dan sudah mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2014. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK per-September 2019 terdapat total 20 Unit Usaha Syariah yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa

³⁸ Sugiyono, *Metode...*, h. 80.

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).³⁹ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan bulanan sebanyak 60 data dari unit usaha syariah.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁰ Adapun persyaratan yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Unit Usaha Syariah sudah terdaftar di Bank Indonesia berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan per-September 2019.
2. Mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2014-2019.
3. Data merupakan data *time series* bulanan dari bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019 sehingga akan diperoleh 60 data.
4. Data tersedia lengkap.

Tabel 2.3
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama UUS	No	Nama UUS
1.	PT Bank Danamon Indonesia	11.	PT BPD Jawa Timur
2.	PT Bank Permata	12.	PT BPD Sumatera Utara
3.	PT Bank Maybank Indonesia	13.	PT BPD Jambi
4.	PT bank CIMB Niaga	14.	PT BPD Sumatera Barat
5.	PT Bank OCBC NISP	15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
6.	PT Bank Sinarmas	16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	17.	PT BPD Kalimantan Selatan

³⁹ Sugiyono, *Metode...*, h. 81.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode...*, h. 85.

8.	PT BPD DKI	18.	PT BPD Kalimantan Barat
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	19.	PD BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
10	PT BPD Jawa Tengah	20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁴¹ Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pengaruh *Office Channeling, Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *BI Rate* Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat variabel *Office Channeling, Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* dan *BI Rate* sebagai variabel independen serta Total Aset sebagai variabel dependen.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep indikator yang bertujuan untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

⁴¹ Sugiyono, *Metode..*, h. 38.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Jenis Data
1.	Total Aset (Y)	Total aset merupakan indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, dan indikator ukuran bank dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat <i>economies of scale</i> yang dimiliki oleh bank.	Total Aset pada kurun waktu 1 bulan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.	Rasio (Rp)
2.	<i>Office Channeling</i> (X1)	<i>office channeling</i> adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor	Jumlah <i>office channeling</i> pada kurun waktu 1 bulan.	Rasio (unit)

		cabang dan atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.		
3.	FDR (X2)	Rasio FDR merupakan rasio jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga.	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio (%)
4.	NPF (X3)	Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan yang diberikan.	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio (%)
5.	BI Rate (X4)	BI Rate merupakan suku bunga acuan BI dan merupakan sinyal (<i>stance</i>) dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.	BI Rate yang dikeluarkan oleh BI pada kurun waktu 1 bulan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase.	Rasio (%)

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.⁴² Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.⁴³ Dalam melakukan analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk melihat profil dari penelitian tersebut dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari mean, median, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum suatu data.⁴⁴

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu digunakan untuk menguji bahwa data itu baik sesuai dengan realitasnya. Uji ini dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, jika hasil regresi telah terpenuhi asumsi-asumsi regresi maka nilai estimasi yang diperoleh akan bersifat BLUE (*Best Linier Unbias Estimate*). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian...* Hlm. 147.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, Cetakan ke-26, 2017. h. 243.

⁴⁴ Toufan Aldian Syah, *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal el-Jizya: Vol.6 No.1 Januari-Juni 2018, h. 142.

a. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

1) Analisis Grafik

Hasil suatu data dikatakan normal dapat dilihat dari grafik histogram melalui normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal yaitu jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya.

2) Uji Kolmogorov Smirnov

Pengujian normalitas data dapat menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (1 sample K-S). Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya (*Asymptotic Significance*), yaitu :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar dari regresi berganda, yaitu bahwa tidak adanya acak alatnya. Artinya jika ada autokorelasi, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang

diperoleh kurang akurat. Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi penelitian ini digunakan uji *Durbin Watson* dengan ketentuan berikut ini :

- Jika angka $D-W < dL$ maka telah terjadi autokorelasi positif
- $D-W > (4-dL)$ maka telah terjadi autokorelasi negatif
- Jika angka $D-W$ terletak antara dU dan $(4-dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.
- Jika angka $D-W$ terletak diantara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

c. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual tetap maka disebut Homoskedastisitas, namun apabila berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada output SPSS. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai riilnya, semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai riilnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang terbentuk. Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah :

Persamaan...(1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Variabel Dependen (PTA)
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi
- X1 = Variabel Independen Pertama (OC)
- X2 = Variabel Independen Pertama (FDR)
- X3 = Variabel Independen Pertama (NPF)
- X4 = Variabel Independen Pertama (BI Rate)

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mendeteksi seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Koefisien Determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus :

Persamaan..(2)

$$R^2 = \left(\frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\}} \sqrt{\{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \right)^2$$

Nilai R^2 yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya semakin tinggi Nilai R^2 , maka semakin baik yang menandakan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Statistik F

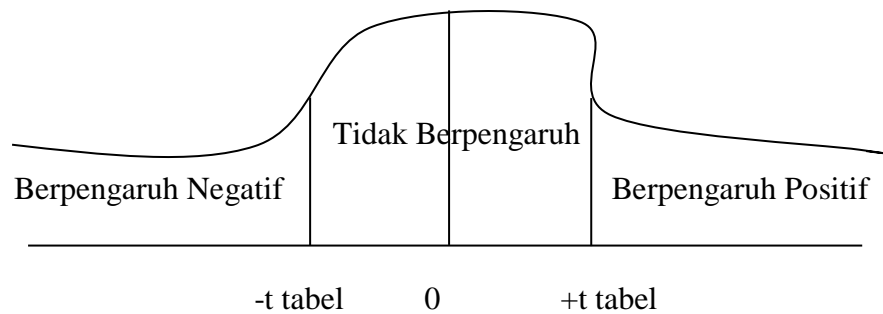
Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji F yang biasa disebut *Analysis Of Varian* (ANOVA). Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% artinya kemungkinan dari hasil kesimpulan adalah benar mempunyai pengaruh sebesar 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%. Kemudian dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi diatas 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Statistik t

Digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah didapatkan t_{hitung} , maka dicari t_{tabel} dengan ketentuan alpha 5% harus dibagi 2 menjadi 0,025 dengan degree of freedom (DF) sebesar $n-2$.

Gambar 2.3
Pengambilan Keputusan Uji t



Kesimpulan yang didapatkan apabila :

- $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti hubungannya signifikan.
- $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi diatas 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti hubungannya signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan mulai bulan Oktober 2014 sampai bulan Agustus 2019. Total Unit Usaha Syariah sampai bulan Agustus 2019 sebanyak 20 yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini yang diolah secara keseluruhan, yaitu:

1. PT Bank Danamon Indonesia

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdiri sejak tahun 1956. Bank Danamon didukung oleh 941 jaringan kantor cabang konvensional, unit usaha syariah dan kantor cabang perusahaannya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Danamon bernama Bank Danamon Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Danamon sebanyak 406 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <https://keuangan.kontan.co.id> pada 21 Februari 2019, Bank Danamon tidak akan terburu-buru melakukan spin off. Bank Danamon akan melakukan pemisahan dengan UUS mengikuti aturan dari regulator yakni pada tahun 2023.

2. PT Bank Permata

PT Bank Permata Tbk atau disebut Permata Bank merupakan salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Dalam perkembangan usahanya Permata Bank juga mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikenal dengan nama Permata Bank Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Permata sebanyak 295 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari www.suara.com pada 19 September 2017, Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk akan melakukan pemisahan kepemilikan (*spin off*) dari induknya ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2021.

3. PT Bank Maybank Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia (BII) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. PT Bank Maybank Indonesia berdiri pada 15 Mei 1959 dan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. PT Bank Maybank mempunyai Unit Usaha Syariah yang dikenal dengan Maybank Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Maybank sebanyak 368 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <https://keuangan.kontan.co.id> pada 11 Desember 2017, Maybank syariah akan *spin off* mengikuti aturan yang berlaku dari regulator yakni sebelum tahun 2023.

4. PT Bank CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebuah bank swasta nasional yang berdiri pada tahun 1955. PT Bank CIMB Niaga mempunyai Unit Usaha Syariah yang dikenal dengan CIMB Niaga Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank CIMB Niaga sebanyak 120 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.republika.co.id pada 08 Agustus 2019, rencana *spin off* Unit Usaha Syariah CIMB Niaga masuk dalam rencana bisnis bank mulai tahun 2020.

5. PT Bank OCBC NISP

PT Bank OCBC NISP merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 04 April 1941 di Bandung. PT Bank OCBC NISP mengoptimalkan layanan dengan mengembangkan unit usaha syariah yang dikenal dengan Bank OCBC NISP Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank OCBC NISP sebanyak 240 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.republika.co.id pada 08

September 2015, Bank OCBC NISP yakin bisa melakukan pemisahan (*spin off*) sendiri. Rencana tersebut sudah masuk RBB dan sudah ada persiapan yang dilakukan kisaran antara tahun 2021-2023.

6. PT Bank Sinarmas

PT Bank Sinarmas Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berdiri pada 18 Agustus 1989, dan berstatus sebagai bank devisa pada tahun 1955. Pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh iji untuk pendirian unit usaha syariah berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP/ Dpg/2009 Tentang pemberian izin usaha UUS PT Bank Sinarmas Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Sinarmas sebanyak 153 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari www.wartaekonomi.co.id pada 27 September 2018 Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas tengah mempersiapkan *spin off* di tahun 2020.

7. PT Bank Tabungan Negara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang terbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan yang berdiri pada tahun 1897. Bank BTN mengembangkan unit usaha syariah yang dikenal dengan nama Bank BTN syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Tabungan Negara sebanyak 298 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.propertikompass.com pada 04 Oktober 2019, BTN memberikan kepastian bahwasannya akan melakukan *spin off* pada tahun 2020.

8. PT BPD DKI

Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah bank di Indonesia yang berdiri pada 11 April 1961. Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa. Bank BPD DKI mengembangkan unit usaha syariah (UUS) dengan nama Bank BPD DKI

Syariah yang pada tahun 2017 telah mempunyai 22 kantor layanan yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung. Serta pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD DKI sebanyak 244 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.keuangan.kontan.co.id pada 11 Desember 2017, Bank BPD DKI menargetkan *spin off* pada tahun 2022.

9. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan BUMD yang berdiri pada tanggal 15 Desember 1961. Sejak tahun 2007 Bank BPD DIY telah membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 4 kantor layanan syariah. Dan pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD DIY sebanyak 34 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.keuangan.kontan.co.id pada 22 April 2019 Bank BPD DIY mempunyai target *spin off* paling lambat pada tahun 2022.

10. PT BPD Jawa Tengah

PT BPD Jawa Tengah atau yang lebih akrab dikenal dengan Bank Jateng adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 yang berpusat di Kota Semarang. Bank Jateng juga mempunyai unit usaha syariah yang dikenal dengan nama Bank Jateng Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Jateng sebanyak 156 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <https://keuangan.kontan.co.id> pada 09 Desember 2019, Bank Jateng sedang mempersiapkan perizinan dan fondasi bank umum pasca *spin off* selesai termasuk didalamnya mengenai manajemen bank Jateng. Perkiraan akan melakukan *spin off* yakni pada tahun 2020-2022 BUS Jateng baru akan dapat beroperasi.

11. PT BPD Jawa Timur

PT BPD Jawa Timur atau Bank Jatim merupakan bank milik daerah yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Jawa Timur sebanyak 191 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <https://keuangan.kontan.co.id> pada 12 April 2019, proses pelepasan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) alias spin off sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah provinsi Jawa Timur bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat terkait pertanyaan modal BUS Bank Jatim. Adapun nantinya Pemrov Jawa Timur harus menyuntikkan dana sebesar Rp. 252 miliar ke Bank Jatim.

12. PT BPD Sumatera Utara

PT BPD Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa yang didirikan pada tanggal 04 November 1961. Untuk mendukung layanan syariah, sejak tahun 2004 Bank Sumut juga telah membuka unit usaha syariah (UUS) yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan cabang pembantu dengan aset telah mencapai 1,5 triliun. Dan hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Sumatera Utara sebanyak 121 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari www.medanbisnisdaily.com pada 28 Juni 2019, terkait dengan *spin off* UUS menjadi BUS masih menjadi kajian dari pihak Bank Sumut. Alasannya dikarenakan keputusan tersebut untuk jangka panjang, sehingga tidak boleh terburu-buru. Selain itu tampak bahwa Bank Sumut tengah galau apakah melakukan *spin off* atau konversi.

13. PT BPD Jambi

Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi didirikan pada 12 Februari 1959 dan berkantor pusat di Kota Jambi. Bank Jambi mempunyai unit usaha syariah (UUS) yang dikenal dengan Bank Jambi

Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD Jambi sebanyak 30 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber www.beritasatu.com pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank BPD Jambi akan melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2020.

14. PT BPD Sumatera Barat

PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 yang berpusat di Kota Padang. Bank Nagari memiliki unit usaha syariah (UUS) yang dikenal dengan Bank Nagari Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD Sumatera Barat sebanyak 31 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari www.m.republika.co.id bahwa Bank Nagari telah resmi melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Hasil tersebut disetujui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RIPSLB) pada November 2019.

15. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Bank Riau Kepri adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru Riau pada tahun 1961. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 52 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari www.Bisnis.com pada 21 Maret 2019, Bank Riau Kepri akan melanjutkan rencana untuk melakukan konversi menjadi bank umum syariah pada dua hingga tahun mendatang.

16. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 06 November 1957. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga mengembangkan unit usaha syariah (UUS) dengan nama Bank Sumsel Babel Syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah

atau *office channeling* Bank BPD Sumsel dan Babel sebanyak 20 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <http://keuangan.kontan.co.id> pada 11 Desember 2017, Bank Sumsel Babel memperkirakan *spin off* unit usaha syariah baru terjadi setelah tahun 2020.

17. PT BPD Kalimantan Selatan

PT BPD Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Bank Kalsel adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1964. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD Kalsel sebanyak 48 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari <https://banjarmasin.tribunnews.com> telah memutuskan untuk *spin off* unit usaha syariahnya pada tahun 2022.

18. PT BPD Kalimantan Barat

PT BPD Kalimantan Barat adalah lembaga keuangan berjenis perbankan daerah di Indonesia. Bank ini berpusat di Pontianak yang didirikan pada tanggal 15 April 1964. Bank Kalbar memiliki unit usaha syariah bernama bank Kalbar syariah. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD Kalbar sebanyak 65 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah.

19. PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) adalah sebuah BUMD yang bergerak di bidang perbankan. Hingga pada Bulan Agustus 2019, jumlah layanan syariah atau *office channeling* Bank BPD Kaltim sebanyak 26 jaringan kantor yang melayani transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari sumber <https://m.kaltim.prokal.com> pada 04 Oktober 2019, *spin off* bank kaltimtara syariah didaftarkan pada bulan Juni 2020.

20. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau yang lebih dikenal dengan Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang berdiri pada tahun 1961. Informasi yang diperoleh dari sumber <http://m.bisnis.com> pada 17

Januari 2019, direksi Bank Sulselbar masih menunggu izin OJK dan terus menyiapkan pemisahan atau *spin off* UUS dengan induknya.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran umum seluruh variabel dari data yang digunakan meliputi minimum, maximum, mean, standar deviasi dan varians. Nilai minimum dan maksimum menggambarkan nilai paling kecil dan paling besar yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu sampel. Nilai standar deviasi menggambarkan seberapa besar keragaman sampel, karena standar deviasi merupakan akar dari varians ataupun varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Jika nilai standar deviasi semakin kecil maka data sampel semakin homogen (hampir sama) antara data sampel dan data populasi sepanjang nilai standar deviasi dibawah nilai mean. Sedangkan nilai varians menunjukkan kelonggaran jarak suatu data. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu total asset dan variabel independen meliputi *office channeling*, FDR, NPF, serta *BI Rate*.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel Total Aset UUS di Indonesia

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OKT-DES 2014	3	64112	67383	65294.67	1813.845	3290034.333
JAN-DES 2015	12	66084	82839	73049.25	4603.317	21190525.477
JAN-DES 2016	12	77827	102320	87768.83	6370.082	40577947.424
JAN-DES 2017	12	95470	136154	110285.50	12630.650	159533308.091
JAN-DES 2018	12	128789	160636	140338.25	9952.224	99046765.659
JAN-SEP 2019	9	155399	165385	160916.67	3013.771	9082816.000
Valid N (listwise)	3					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 4.4 menunjukkan data total aset Unit Usaha Syariah di Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Sebaran data dapat dilihat dari aspek minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan varians. Dilihat dari aspek minimum, terlihat bahwa total aset pada tahun 2019 menunjukkan nilai minimum paling tinggi yakni sebesar Rp. 155.399.000.000 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan nilai minimum terendah pada tahun 2014 sebesar Rp. 64.112.000.000 (enam puluh empat miliar seratus dua belas juta rupiah). Sedangkan nilai maksimum paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2019 sebesar Rp.165.385.000.000 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan nilai maksimum terendah pada tahun 2014 sebesar Rp. 67.383.000.000 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Nilai maksimum dan minimum pada tahun 2015, 2016, dan 2017 naik secara linier. Fakta diatas menunjukkan bahwa total aset UUS terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan menandakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bank syariah meningkat. Sebaran data yang paling baik ditunjukkan oleh data pada tahun 2019 dengan perbandingan selisih nilai mean dan standar deviasi sebesar $160916,67 > 3013,771$. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai varians yang sangat besar, artinya bahwa telah terjadi perkembangan asset yang cukup signifikan.

Tabel 5.4
Statistik Deskriptif Variabel *Office Channeling*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OC OKT-DES 2014	3	1703	1787	1740.67	42.665	1820.333
OC JAN-DES 2015	12	1792	2015	1932.00	83.669	7000.545
OC JAN-DES 2016	12	1995	2567	2218.00	260.677	67952.364
OC JAN-DES 2017	12	2492	2624	2528.67	45.472	2067.697
OC JAN-DES 2018	12	2636	2797	2654.17	45.182	2041.424
OC JAN-SEP 2019	9	2796	2898	2832.67	49.143	2415.000
Valid N (listwise)	3					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 5.4 menunjukkan data *office chenneling* Unit Usaha Syariah di Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Sebaran data dapat dilihat dari aspek minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan varians. Dilihat dari aspek minimum, terlihat bahwa pada tahun 2019 *office chenneling* menunjukkan nilai minimum paling tinggi yakni sebesar 2796 unit dan nilai minimum terendah pada tahun 2014 sebesar 1703 unit. Sedangkan nilai maksimum paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2019 sebesar 2898 unit dan nilai maksimum terendah pada tahun 2014 sebesar 1787 unit. Nilai maksimum dan minimum pada tahun 2015, 2016, dan 2017 naik secara linier. Fakta diatas menunjukkan bahwa *office chenneling* UUS terjadi peningkatan jaringan layanan yang cukup tinggi dan menandakan bahwa bank konvensional ikut berantusias dalam membuka *office chenneling* guna melayani transaksi syariah masyarakat. Sebaran data yang paling baik ditunjukkan oleh data pada tahun 2019 dengan perbandingan selisih nilai mean dan standar deviasi sebesar $2832,67 > 49,143$. Pada tahun 2016 menunjukkan nilai varians yang sangat besar, artinya bahwa telah terjadi perkembangan *office chenneling* yang cukup signifikan.

Tabel 6.4
Statistik Deskriptif Variabel FDR

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
FDR OKT-DES 2014	3	109.02	112.06	110.8833	1.63219	2.664
FDR JAN-DES 2015	12	104.88	111.72	109.0017	1.76606	3.119
FDR JAN-DES 2016	12	96.60	105.65	99.6892	3.29417	10.852
FDR JAN-DES 2017	12	97.43	102.78	99.9567	1.58350	2.507
FDR JAN-DES 2018	12	98.18	111.76	104.8042	4.10583	16.858
FDR JAN-SEP 2019	9	99.46	104.12	101.7289	1.60738	2.584
Valid N (listwise)	3					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 6.4 menunjukkan data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Unit Usaha Syariah di Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Sebaran data dapat dilihat dari aspek minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan varians. Dilihat dari aspek minimum, terlihat bahwa pada tahun 2014 FDR menunjukkan nilai minimum paling tinggi yakni sebesar $109,02\% < 110\%$ dan nilai minimum terendah pada tahun 2016 sebesar $96,60\% < 110\%$ yang keduanya masih tergolong sehat. Sedangkan nilai maksimum paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2014 sebesar $112,06\% > 100\%$ dan nilai maksimum terendah pada tahun 2017 sebesar $102,78\% < 100\%$. Fakta diatas menunjukkan telah terjadinya tingkat FDR yang tidak sehat di tahun 2014 dimana pembiayaan yang diberikan lebih besar ketimbang dana pihak ketiga yang terhimpun. Sebaran data pada masing-masing tahun sudah memberikan hasil yang baik dimana nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata (mean). Pada tahun 2018 menunjukkan nilai varians yang sangat besar, artinya bahwa telah terjadi perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang cukup signifikan.

Tabel 7.4
Statistik Deskriptif Variabel NPF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
NPF OKT-DES 2014	3	2.55	3.00	2.7900	.22650	.051
NPF JAN-DES 2015	12	2.90	3.78	3.3283	.37104	.138
NPF JAN-DES 2016	12	3.26	3.97	3.4850	.20483	.042
NPF JAN-DES 2017	12	2.11	3.67	2.9725	.52848	.279
NPF JAN-DES 2018	12	2.15	2.54	2.3450	.14400	.021
NPF JAN-SEP 2019	9	2.30	3.09	2.7622	.28319	.080
Valid N (listwise)	3					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 7.4 menunjukkan data *Non-Performing Financing* (NPF) Unit Usaha Syariah di Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Sebaran data dapat dilihat dari aspek minimum, maksimum, mean,

standar deviasi dan varians. Dilihat dari aspek minimum, terlihat bahwa pada tahun 2015 NPF menunjukkan nilai minimum paling tinggi yakni sebesar 2,90% dan nilai minimum terendah pada tahun 2017 sebesar 2,11%. Sedangkan nilai maksimum paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2017 sebesar 3,97% dan nilai maksimum terendah pada tahun 2018 sebesar 2,54%. Fakta diatas menunjukkan bahwa selama ini unit usaha syariah telah berhasil menjaga rasio NPF (kurang dari 5%) dengan menekan pembiayaan bermasalah. Sebaran data pada masing-masing tahun sudah memberikan hasil yang baik dimana nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata (mean). Pada tahun 2017 menunjukkan nilai varians yang sangat besar yaitu 0,279, artinya bahwa telah terjadi perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) yang cukup signifikan.

Tabel 8.4
Statistik Deskriptif Variabel BI Rate

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
BIRATE OKT-DES 2014	3	7.50	7.75	7.6667	.14434	.021
BIRATE JAN-DES 2015	12	7.50	7.75	7.5208	.07217	.005
BIRATE JAN-DES 2016	12	4.75	7.25	6.0000	1.00000	1.000
BIRATE JAN-DES 2017	12	4.25	4.75	4.5625	.24133	.058
BIRATE JAN-DES 2018	12	4.25	6.00	5.0833	.73340	.538
BIRATE JAN-SEP 2019	9	5.25	6.00	5.8333	.27951	.078
Valid N (listwise)	3					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 8.4 menunjukkan data BI Rate di Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019. Sebaran data dapat dilihat dari aspek minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan varians. Dilihat dari aspek minimum, terlihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 BI Rate menunjukkan nilai minimum paling tinggi yakni sebesar 7,50% dan nilai minimum terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 4,25%. Sedangkan nilai maksimum paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 7,75% dan nilai

maksimum terendah pada tahun 2017 sebesar 4,75%. Sebaran data pada masing-masing tahun sudah memberikan hasil yang baik dimana nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata (mean). Pada tahun 2016 menunjukkan nilai varians yang sangat besar yaitu sebesar 1,000, artinya bahwa telah terjadi perkembangan BI *Rate* yang cukup signifikan pada tahun tersebut.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

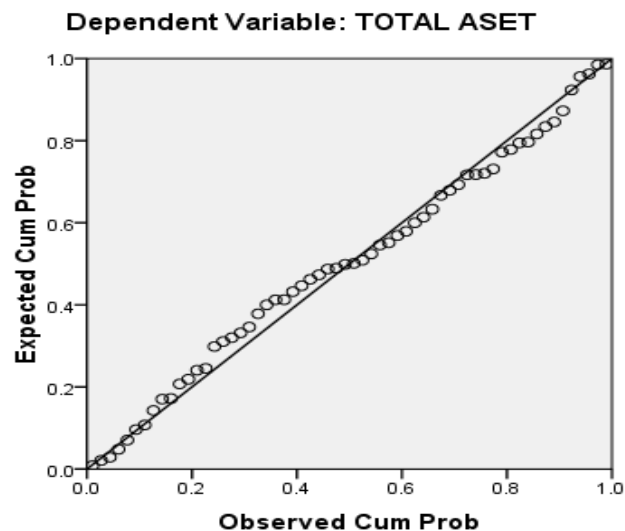
Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

1. Uji Grafik

Uji Normalitas ditunjukkan oleh grafik 6.4 dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan *normal probability plot*. Data plotting (titik-titik) terlihat mengikuti garis diagonal maka berarti model regresi berdistribusi normal.

Grafik 6.4
Uji Normalitas Data

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

2. Uji Kolmogorov-Smirnov

Pengujian Uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov (1 sample K-S). Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Pada tabel 9.4 diperoleh nilai Sig 0,970 > 0,05 yang berarti bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 9.4
Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.04180711E3
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.046
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.490
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Pada penelitian ini dengan menggunakan jumlah data (n) = 60 dan jumlah variabel bebas sebanyak 4 maka diperoleh kesimpulan pada tabel *Durbin Watson* terletak angka dL = 1.4443 dan dU = 1.7274.

Tabel 10.4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.791	6382.03441	1.833

a. Predictors: (Constant), BIRATE, NPF, FDR, OC

b. Dependent Variable: TOTAL ASET

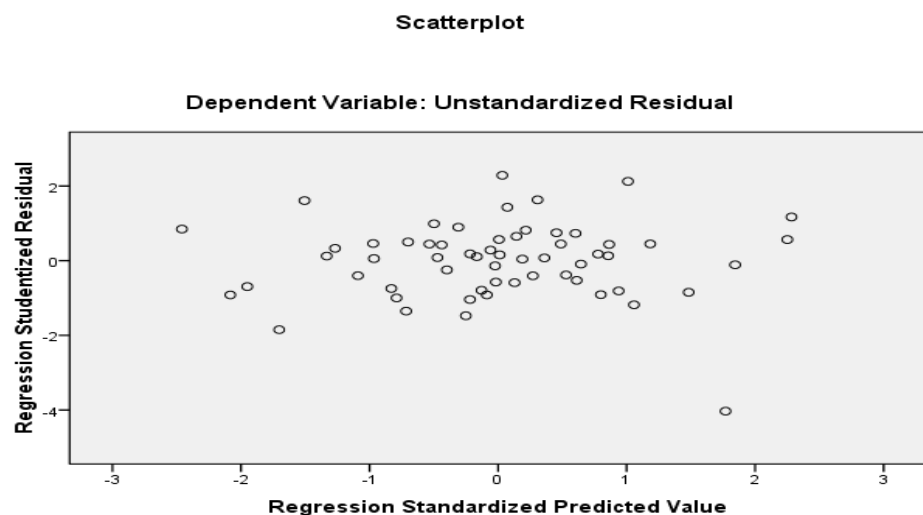
Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Tabel 10.4 menunjukkan bahwa dihasilkan nilai *Durbin-Watson* (D-W) sebesar 1.833 terletak antara $dU = 1.7274$ dan $(4-dU) = 2.2726$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain.

Grafik 7.4
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

Uji heteroskedastisitas salah satunya adalah dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada output SPSS. Berdasarkan Grafik 7.4 diatas menunjukkan bahwa sebaran data menyebar diatas dan dibawah angka nol serta menyebar secara acak atau tidak membentuk adanya pola tertentu yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima.

Tabel 11.4
Hasil Uji Hipotesis

No	Model	B	t	Sig
1.	Constant	-42270,461	-1,824	0,074
2.	Office Channeling (X1)	91,443	10,379	0,000
3.	FDR (X2)	-224,687	-0,523	0,603
4.	NPF (X3)	-11559,375	-3,275	0,002
5.	BI Rate (X4)	9270,970	3,569	0,001
6.	Uji Kelayakan Model	0,791 (79,1%)		
7.	F-Test	55,971		0,000

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Output SPSS

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Berdasarkan hasil pengujian tabel 11.4 diperoleh hasil analisis regresi sesuai dengan persamaan (1) dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = -42270,461 + 91,443 (OC^{***}) - 224,687 (FDR) - 11559,375 (NPF^{***}) + 9270,970 (BI\ Rate^{***}) + \epsilon$$

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- a. Konstanta sebesar -42270,461 menyatakan bahwa jika *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan BI Rate dianggap sebesar 0 maka total aset unit usaha syariah mengalami penurunan sebesar 42270,461 miliar.
- b. Variabel *Office Channeling* sebesar 91,443 menyatakan bahwa ketika *office channeling* bertambah sebesar 1 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 91,443 miliar
- c. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar -224,687 menyatakan bahwa ketika FDR bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 224,687 miliar.
- d. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -11559,375 menyatakan bahwa ketika NPF bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 11559,375 miliar.
- e. Variabel *BI Rate* sebesar 9270,970 menyatakan bahwa ketika BI *Rate* bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 9270,970 miliar.

2. Koefisien Detreminasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 11.4 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,791. Hal ini berarti bahwa nilai koefisien determinasi yang disesuaikan dalam Adjusted R Square sebesar 0,791 atau 79,1%. Artinya sebanyak 79,1% variabel total aset dapat dijelaskan oleh variabel *office channeling*, *financing to deposit ratio*, *non-performing financing*,

dan BI *rate*. Sedangkan sekitar 20,9% ($100\% - 79,1\% = 20,9\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Penafsiran Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 11.4 diperoleh hasil yaitu :

- a. Pengaruh *Office Channeling* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Hipotesis pertama (H_{a1}) adalah *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Pada variabel *office channeling* mempunyai $t_{hitung} = 10.379 > 2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a1} diterima yaitu *office channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap total asset.

- b. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Hipotesis kedua (H_{a2}) adalah FDR berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Pada variabel FDR mempunyai $t_{hitung} = -0,523 > -2.00404$ dengan nilai signifikansi $-0,603 > 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a2} diterima yaitu FDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap total asset.

- c. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Hipotesis ketiga (H_{a3}) adalah NPF berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Pada variabel NPF mempunyai $t_{hitung} = -3,275 < -2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a3} diterima yaitu NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap total asset.

- d. Pengaruh BI *Rate* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Hipotesis keempat (H_{a4}) adalah Bi Rate berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Pada variabel BI Rate mempunyai $t_{hitung} = 3.569 > 2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a4} ditolak yaitu BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap total aset.

4. Penafsiran Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 11.4 terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 55,971 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai F_{tabel} sebesar = 3,68 yang berarti $55,971 > 3,68$. Uji ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi tingkat total aset. Hal ini membuktikan bahwa *Office Channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *BI Rate* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS).

4.5 Interpretasi Data

4.5.1 Pengaruh *Office Channeling* (OC) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

Office channeling adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang dan atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Hipotesis pertama (H_{a1}) adalah *office channeling* berpengaruh positif terhadap total aset unit usaha syariah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh *office channeling* mempunyai $t_{hitung} = 10.379 > 2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a1} diterima yaitu *office channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset. Ketika *office channeling*

bertambah sebesar 1 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total asset unit usaha syariah sebesar Rp. 91,443 Miliar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairienisa Rohaya (2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total asset. Hal ini dikarenakan penambahan *office channeling* akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini unit usaha syariah tidak perlu lagi membuka cabang di banyak tempat sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien selain itu dampak terhadap total asetnya juga bertambah akibat dari DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan tersalurkan melalui pembiayaan oleh masyarakat.

4.5.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

Rasio FDR merupakan rasio jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh variabel FDR mempunyai $t_{hitung} = -0,523 > -2,00404$ dengan nilai signifikansi $-0,603 > 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a2} diterima yaitu FDR berpengaruh negatif terhadap total asset tetapi tidak signifikan. Ketika FDR bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total asset unit usaha syariah sebesar sebesar Rp. 224,687 Miliar.

Sejalan dengan penelitian Irma Setyawati (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang didukung oleh koefisien regresi antara FDR dan PTA sebesar $-0,003$, yang menunjukkan penurunan PTA sebesar $0,003$ apabila terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan. Hal ini dikarenakan bahwa bank dengan tingkat likuiditas tinggi dikategorikan

baik, tetapi jika kelebihan likuiditas menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap total aset. Selain itu Penyaluran DPK dalam bentuk pembiayaan belum tentu menghasilkan keuntungan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Aryani, Lukytawari Anggraeni, dan Ranti Wilasih yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014 mengatakan bahwa peningkatan FDR sebesar 1% akan meningkatkan volume NPF sebesar 0,006%. Hal ini terjadi karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan bank akan menimbulkan resiko pembiayaan yang sebanding.

4.5.3 Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan yang diberikan. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh variabel NPF mempunyai $t_{hitung} = -3,275 < -2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a3} diterima maka NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap total aset. Ketika NPF bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 11.559,375 Miliar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018) yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun

bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank. Keuntungan yang berkurang otomatis akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang. Bank dengan tingkat kualitas aset rendah memiliki jumlah aktiva produktif bermasalah yang sangat rendah dibandingkan dengan total aktiva produktif yang dimiliki.

4.5.4 Pengaruh BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

BI Rate merupakan suku bunga acuan BI dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. variabel BI Rate mempunyai $t_{hitung} = 3.569 > 2.00404$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a4} ditolak dikarenakan BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap total aset. Ketika BI Rate bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 9.270,970 Miliar.

Fungsi operasional perbankan syariah adalah tidak hanya terfokus kepada penghimpunan dana saja melainkan juga dalam hal pembiayaan. Ketika suku bunga naik, maka tidak hanya akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito bank konvensional tetapi juga berimbas kepada suku bunga kredit di bank konvensional. Jika suku bunga kredit dirasakan cukup tinggi oleh masyarakat, maka masyarakat akan lebih beralih melakukan pembiayaan di bank syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nuril Hidayati (2014) menyatakan bahwa meskipun BI Rate naik, akan tetapi profitabilitas bank syariah tetap meningkat. Hal tersebut dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Contohnya, bank syariah meningkatkan fee bagi hasil pada tabungan dan deposito sehingga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Selain itu juga

dengan memberikan margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan bunga kredit bank konvensional membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional.⁴⁵

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019) yang menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Naiknya suku bunga bank konvensional akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi.

⁴⁵ Hidayati, *Pengaruh...*, h. 91-92.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Office Channeling*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *BI Rate* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank bulanan statistik perbankan syariah yang diunduh melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id pada periode 2014-2019 dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) yaitu www.bi.go.id pada bulan Oktober 2014 – bulan September 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. *Office Channeling* berpengaruh positif signifikan terhadap total aset unit usaha syariah. Dengan pengaruh sebesar 91,443 yaitu ketika *office channeling* bertambah sebesar 1 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 91,443 Miliar.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap total aset unit usaha syariah. Dengan pengaruh sebesar 224,687 yaitu ketika FDR bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total aset unit usaha syariah sebesar sebesar Rp. 224,687 Miliar.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap total aset unit usaha syariah. Dengan pengaruh sebesar 11.559,375 yaitu ketika NPF bertambah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi penurunan pada total aset unit usaha syariah sebesar Rp. 11.559,375 Miliar.
4. *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap total aset unit usaha syariah. Dengan pengaruh sebesar ketika *BI Rate* bertambah sebesar 1%,

dengan asumsi variabel lainnya tetap maka terjadi kenaikan pada total asset unit usaha syariah sebesar Rp. 9.270,970 Miliar.

Dari jawaban permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel independen mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam fluktuasi Total Aset Unit Usaha Syariah pada bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2019.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Unit Usaha Syariah

Dalam menjaga kualitas total aset setiap bulannya, bank syariah dituntut untuk meningkatkan dengan cara mengembangkan inovasi produk dan layanan serta dengan melihat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Dengan memanfaatkan jaringan layanan *office channeling* untuk menghimpun dana pihak ketiga, menjaga likuiditas dengan memperkirakan pembiayaan yang akan diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan, serta senantiasa mengembangkan inovasi produk dan layanan agar nasabah tidak beralih kepada bank konvensional akibat faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga atau BI rate.

5.2.2 Bagi Akademik

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel lain seperti BPRS, dikarenakan penelitian terdahulu hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan mencakup perbankan keseluruhan (UUS, BUS, BPRS). Bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini diharapkan agar menambah atau menggunakan variabel-variabel lain selain dari faktor internal (*office channeling*, NPF, FDR) dan faktor eksternal (BI Rate).

DAFTAR PUSTAKA

- Arrazy, Zakaria. *Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014* (UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015).
- Aryani, Yulya, dkk. *Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Al-Muzara'ah: Vol.4, No.1, 2016.
- Cleopatra, Yuria Prathiwi. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 5, No.1, 2008.
- Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan: Vol.3 No.3 2016.
- Diana Djuwita, Assa Fito Mohammad, *Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia*, Al-Amwal: Vol.8, No.1, 2018.
- Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah*, Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.16. No.1, 2019.
- Hidayati, Amalia Nuril. *Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah: Vol. 01, No.01, Oktober 2014.
- Hosen, M. Nadratuzzaman. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, Cet.ke-1, 2007.
- Ida Syafrida Dan Ahmad Abror, *Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis: Vol.10 No.1.
- Itang, *Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*, Alqalam: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016.
- Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016*, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, 2017.

- Lubis, Ahmad Fadlan. *Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia*, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Volume 1, Desember 2016.
- Musharianto, Adi. *Suku Bunga Bank Indonesia, Financing To Deposit Ratio dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. *Risiko Bank Syariah*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prasetyo, Luhur. *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir: Vol. 12, No. 1 Mei 2012.
- Rahmawati, Teti. *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channelling*, JRKA: Volume 1 Issue 2, Agustus 2015.
- Rohaya', Hairiennisa. *Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling*, Jurnal Ekonomi Islam: Vol. II, No.2, Desember 2008.
- Rongiyati, Sulasi. *Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah*, Negara Hukum: Vol.6, No.1, Juni, 2015.
- Setyawati, Irma. *Determinan Pertumbuhan Total Asset dengan Pendekatan Variabel Spesifik Bank dan Pangsa Pasar Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, MediastimaTahun XXI: Nomor.2, 2015.
- Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol.12 No.1 Juni 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, Cetakan ke-14, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, Cetakan ke-26, 2017.
- Syarif, Muhammad. *Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2010.

- Syah, Toufan Aldian. *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal el-Jizya: Vol.6 No.1 Januari-Juni 2018.
- Tim BI, *Peraturan BI No.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No.2 Juli-Desember 2018,
- Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani. “*Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2012-2016*”. Jurnal Akuntansi UNESA: Vol. 6 (3), 2019.

www.ojk.go.id, diakses pada 01 Juli 2019.

www.bi.go.id diakses pada 01 Juli 2019.

<https://keuangan.kontan.co.id> diakses pada 19 Desember 2019.

www.suara.com diakses pada 19 Desember 2019.

www.republika.co.id diakses pada 19 Desember 2019.

www.wartaekonomi.co.id diakses pada 19 Desember 2019.

www.propertikompas.com diakses pada 19 Desember 2019.

www.medanbisnisdaily.com diakses pada 19 Desember 2019.

www.beritasatu.com diakses pada 19 Desember 2019.

www.Bisnis.com diakses pada 19 Desember 2019.

<https://banjarmasin.tribunnews.com> diakses pada 19 Desember 2019.

<https://m.kaltim.prokal.com> diakses pada 19 Desember 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Data Unit Usaha Syariah Oktober 2014-September 2019

No	TAHUN	BULAN	TOTAL ASET(Miliar)	OC	FDR (%)	NPF (%)	BI RATE (%)
1	2014	Oktober	64112	1703	111,57	3,00	7,5
2		November	64389	1732	112,06	2,82	7,75
3		Desember	67383	1784	109,02	2,55	7,75
4	2015	Januari	66084	1792	110,40	2,90	7,75
5		Februari	66965	1799	109,73	3,05	7,5
6		Maret	69804	1825	111,72	2,93	7,5
7		April	71320	1897	109,50	3,04	7,5
8		Mei	71981	1953	109,63	2,95	7,5
9		Juni	73277	1957	109,25	3,76	7,5
10		Juli	71812	1957	110,02	3,78	7,5
11		Agustus	74227	1999	109,25	3,70	7,5
12		September	78137	2015	107,71	3,68	7,5
13		Oktober	75169	2015	107,01	3,66	7,5
14		November	74976	1966	108,92	3,46	7,5
15		Desember	82839	2009	104,88	3,03	7,5
16	2016	Januari	77827	2009	105,65	3,32	7,25
17		Februari	79838	2002	103,16	3,33	7
18		Maret	84710	2012	104,56	3,73	6,75
19		April	83079	2024	102,04	3,58	6,75
20		Mei	86577	2000	97,07	3,97	6,75
21		Juni	90107	1995	99,60	3,49	6,5
22		Juli	88063	2018	98,69	3,54	6,5
23		Agustus	88521	2465	96,84	3,46	5,25
24		September	89826	2480	97,65	3,34	5
25		Oktober	89376	2480	97,71	3,31	4,75
26		November	92982	2564	96,60	3,26	4,75
27	Desember	102320	2567	96,70	3,49	4,75	
28	2017	Januari	95470	2555	97,43	3,67	4,75
29		Februari	95920	2531	97,98	3,55	4,75
30		Maret	100967	2518	99,28	3,5	4,75
31		April	100780	2504	101,67	3,47	4,75

32		Mei	102354	2496	101,31	3,4	4,75
33		Juni	106368	2492	102,78	2,87	4,75
34		Juli	108648	2499	101,45	2,80	4,75
35		Agustus	111725	2503	99,14	2,78	4,5
36		September	119148	2506	99,07	2,72	4,25
37		Oktober	122445	2503	98,78	2,44	4,25
38		November	123447	2613	100,2	2,36	4,25
39		Desember	136154	2624	99,39	2,11	4,25
40	2018	Januari	128789	2640	98,18	2,41	4,25
41		Februari	128870	2644	102,12	2,52	4,25
42		Maret	133934	2648	101,54	2,46	4,25
43		April	131655	2639	101,37	2,54	4,25
44		Mei	133035	2639	101,28	2,52	4,5
45		Juni	138884	2640	105,19	2,28	5,25
46		Juli	139230	2640	107,78	2,30	5,25
47		Agustus	142047	2641	111,76	2,18	5,5
48		September	150801	2636	107,71	2,15	5,75
49		Oktober	149957	2636	108,79	2,32	5,75
50		November	146221	2650	108,71	2,31	6
51		Desember	160636	2797	103,22	2,15	6
52	2019	Januari	155399	2801	101,43	2,3	6
53		Februari	158277	2797	104,12	2,39	6
54		Maret	161758	2796	100,87	2,73	6
55		April	161638	2809	99,46	2,92	6
56		Mei	159194	2798	100,27	2,82	6
57		Juni	163944	2799	100,39	3,09	6
58		Juli	160437	2898	102,98	3,02	5,75
59		Agustus	162218	2898	103,30	3,00	5,5
60		September	165385	2898	102,74	2,59	5,25

Lampiran 2 Pengolahan Data SPSS

OC_X1	FDR_X2	NPF_X3	BIRATE_X4	TOTAL ASET_Y	RES_1	LAG_RES1	OC	FDR	NPF	BIRATE	TOTAL ASET
1703	111,57	3,00	7,50.00	64112	6383						
1732	112,06	2,82	7,75.00	64389	-2108	6383,01	717,01	45,56	1,03	3,28	26178,25
1787	109,02	2,55	7,75.00	67383	-10858	-2108,64	754,73	42,23	0,87	3,13	29007,16
1792	110,40	2,90	7,75.00	66084	-5743	-10858,33	726,95	45,42	1,38	3,13	25923,73
1799	109,73	3,05	7,50.00	66965	-265	-5743,40	730,97	43,93	1,32	2,88	27578,94
1825	111,72	2,93	7,50.00	69804	-1119	-265,85	752,80	46,32.	1,11	3,03	29892,86
1897	109,50	3,04	7,50.00	71320	-5865	-1119,44	809,30	42,91	1,29	3,03	29716,82
1953	109,63	2,95	7,50.00	71981	-12257	-5865,30	822,39	44,37	1,14	3,03	29474,28
1957	109,25	3,76	7,50.00	73277	2831	-12257,26	793,01	43,91	2,00	3,03	30376,32
1957	110,02	3,78	7,50.00	71812	2108	2831,67	790,63	44,91.	1,54	3,03	28138,91
1999	109,25	3,70	7,50.00	74227	-1423	2108,91	832,63	43,68	1,45	3,03	31427,05
2015	107,71	3,68	7,50.00	78137	-220	-1423,94	823,60	42,60	1,47	3,03	33897,71
2015	107,01	3,66	7,50.00	75169	-3895	-220,75	814,06	42,81	1,47	3,03	28599,35
1966	108,92	3,46	7,50.00	74976	-1847	-3895,79	765,06	45,14	1,28	3,03	30175,28
2009	104,88	3,03	7,50.00	82839	-7888	-1847,86	837,26	39,96	0,97	3,03	38153,30
2009	105,65	3,32	7,25.00	77827	-4404	-7888,58	811,64	43,14	1,51	2,78	28454,96
2002	103,16	3,33	7,00.00	79838	182,71761	-4404,64	804,64	40,19	1,35	2,68	33453,11
2012	104,56	3,73	6,75.00	84710	14834	182,72	818,81	43,08	1,75	2,58	37126,55
2024	102,04	3,58	6,75.00	83079	8090	14834,25	824,85	39,72	1,36	2,73	32591,84
2000	97,07	3,97	6,75.00	86577	18377	8090,32	793,70	36,25	1,84	2,73	37061,92

1995	99,60	3,49	6,50.00	90107	18113	18377,95	803,00	41,75	1,12	2,48	38507,11
2018	98,69	3,54	6,50.00	88063	14232	18113,57	828,98	39,33	1,46	2,63	34359,23
2465	96,84	3,46	5,25.00	88521	-16923	14232,06	1262,27	38,02	1,35	1,38	36035,45
2480	97,65	3,34	5,00.00	89826	-15858	-16923,03	1010,86	39,93	1,28	1,87	37067,48
2480	97,71	3,31	4,75.00	89376	-13850	-15858,67	1001,92	39,51	1,32	1,77	35839,70
2564	96,60	3,26	4,75.00	92982	-19970	-13850,11	1085,92	38,36	1,29	1,92	39713,90
2567	96,70	3,49	4,75.00	102320	-6795	-19970,96	1038,86	39,13	1,55	1,92	46902,73
2555	97,43	3,67	4,75.00	95470	-8900	-6795,68.	1025,07	39,80	1,59	1,92	34487,28
2531	97,98	3,55	4,75.00	95920	-7937	-8900,38	1008,22	39,91	1,36	1,92	39019,88
2518	99,28	3,50	4,75.00	100967	-1843	-7937,89	1009,52	40,88	1,38	1,92	43798,68
2504	101,67	3,47	4,75.00	100780	19,42894	-1843,10	1003,27	42,50	1,38	1,92	40603,67
2496	101,31	3,40	4,75.00	102354	958,49439	19,43	1003,62	40,71	1,33	1,92	42289,12
2492	102,78	2,87	4,75.00	106368	-3301	958,49	1004,38	42,40	0,84	1,92	45365,02
2499	101,45	2,80	4,75.00	108648	-3623	-3302,00	1013,77	40,19	1,09	1,92	45252,67
2503	99,14	2,78	4,50.00	111725	503,41801	-3623,49	1013,60	38,68	1,11	1,67	46970,79
2506	99,07	2,72	4,25.00	119148	9491	503,42	1014,21	39,98	1,06	1,57	52559,90
2503	99,78	2,44	4,25.00	122445	8470	9491,32	1009,42	40,73	0,82	1,72	51432,79
2613	100,20	2,36	4,25.00	123447	-2580	8470,82	1121,21	40,73	0,91	1,72	50469,78
2624	99,39	2,11	4,25.00	136154	4197	-2580,35	1066,65	39,67	0,70	1,72	62579,59
2640	98,18	2,41	4,25.00	128789	-28,39644	4197,12	1076,10	38,94	1,15	1,72	47641,22
2644	102,12	2,52	4,25.00	128870	3592	-28,40	1070,56	43,60	1,08	1,72	52111,76
2648	101,54	2,46	4,25.00	133934	6905	3592,23	1072,18	40,68	0,96	1,72	57127,48
2639	101,37	2,54	4,25.00	131655	6848	6905,15	1060,79	40,85	1,07	1,72	51830,34
2639	101,28	2,52	4,50.00	133035	4866	6848,01	1066,16	40,86	1,01	1,97	54568,62
2640	105,19	2,28	5,25.00	138884	-559	4866,81	1067,16	44,83	0,78	2,57	59595,14

2640	107,78	2,30	5,25.00	139230	1443	-559,53	1066,56	45,09	0,94	2,12	56455,14
2641	111,76	2,18	5,50.00	142047	1072	1443,95	1067,56	47,52	0,81	2,37	59065,92
2636	107,71	2,15	5,75.00	150801	4789	1072,77	1061,96	41,10	0,85	2,47	66140,99
2636	108,79	2,32	5,75.00	149957	7506	4789,59	1064,94	44,59	1,04	2,32	60079,60
2650	108,71	2,31	6,00.00	146221	-788	7506,37	1078,94	43,87	0,93	2,57	56846,63
2797	103,22	2,15	6,00.00	160636	-6466	-788,47	1217,60	38,43	0,77	2,42	73488,28
2801	101,43	2,30	6,00.00	155399	-10335	-6466,37	1133,99	39,91	1,02	2,42	59659,94
2797	104,12	2,39	6,00.00	158277	-4112	-10335,20	1127,60	43,67	1,02	2,42	65659,20
2796	100,87	2,73	6,00.00	161758	3868	-4112,52	1128,99	38,81	1,31	2,42	67424,91
2809	99,46	2,92	6,00.00	161638	5130	3868,06	1142,58	39,34	1,29	2,42	65230,23
2798	100,27	2,82	6,00.00	159194	2402	5130,11	1123,84	40,99	1,08	2,42	62857,75
2799	100,39	3,09	6,00.00	163944	11907	2402,76	1131,39	40,63	1,41	2,42	69064,38
2898	102,98	3,02	5,75.00	160437	1661	11907,31	1229,80	43,15	1,18	2,17	62726,38
2898	103,30	3,00	5,50.00	162218	6209	1661,25	1170,79	41,92	1,20	2,07	66597,55
2898	102,74	2,59	5,25.00	165385	4777	6209,07	1170,79	41,17	0,80	1,97	68703,07
						4777,44					

Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OKT-DES 2014	3	64112	67383	65294.67	1813.845	3290034.333
JAN-DES 2015	12	66084	82839	73049.25	4603.317	21190525.477
JAN-DES 2016	12	77827	102320	87768.83	6370.082	40577947.424
JAN-DES 2017	12	95470	136154	110285.50	12630.650	159533308.091
JAN-DES 2018	12	128789	160636	140338.25	9952.224	99046765.659
JAN-SEP 2019	9	155399	165385	160916.67	3013.771	9082816.000
Valid N (listwise)	3					

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OC OKT-DES 2014	3	1703	1787	1740.67	42.665	1820.333
OC JAN-DES 2015	12	1792	2015	1932.00	83.669	7000.545
OC JAN-DES 2016	12	1995	2567	2218.00	260.677	67952.364
OC JAN-DES 2017	12	2492	2624	2528.67	45.472	2067.697
OC JAN-DES 2018	12	2636	2797	2654.17	45.182	2041.424
OC JAN-SEP 2019	9	2796	2898	2832.67	49.143	2415.000
Valid N (listwise)	3					

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
FDR OKT-DES 2014	3	109.02	112.06	110.8833	1.63219	2.664
FDR JAN-DES 2015	12	104.88	111.72	109.0017	1.76606	3.119
FDR JAN-DES 2016	12	96.60	105.65	99.6892	3.29417	10.852
FDR JAN-DES 2017	12	97.43	102.78	99.9567	1.58350	2.507
FDR JAN-DES 2018	12	98.18	111.76	104.8042	4.10583	16.858
FDR JAN-SEP 2019	9	99.46	104.12	101.7289	1.60738	2.584
Valid N (listwise)	3					

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
NPF OKT-DES 2014	3	2.55	3.00	2.7900	.22650	.051
NPF JAN-DES 2015	12	2.90	3.78	3.3283	.37104	.138
NPF JAN-DES 2016	12	3.26	3.97	3.4850	.20483	.042
NPF JAN-DES 2017	12	2.11	3.67	2.9725	.52848	.279
NPF JAN-DES 2018	12	2.15	2.54	2.3450	.14400	.021
NPF JAN-SEP 2019	9	2.30	3.09	2.7622	.28319	.080
Valid N (listwise)	3					

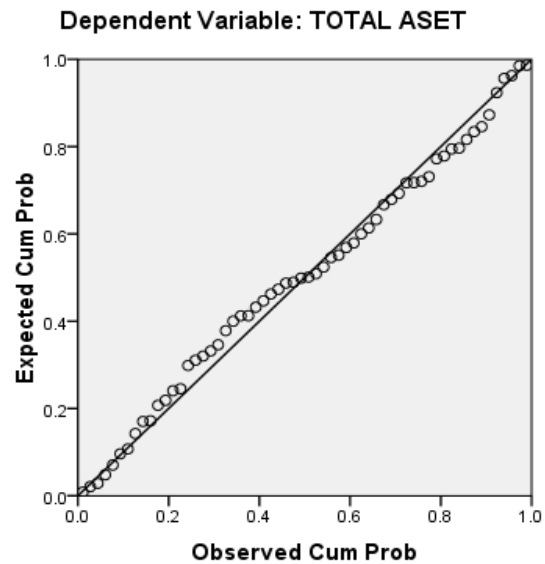
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
BIRATE OKT-DES 2014	3	7.50	7.75	7.6667	.14434	.021
BIRATE JAN-DES 2015	12	7.50	7.75	7.5208	.07217	.005
BIRATE JAN-DES 2016	12	4.75	7.25	6.0000	1.00000	1.000
BIRATE JAN-DES 2017	12	4.25	4.75	4.5625	.24133	.058
BIRATE JAN-DES 2018	12	4.25	6.00	5.0833	.73340	.538
BIRATE JAN-SEP 2019	9	5.25	6.00	5.8333	.27951	.078
Valid N (listwise)	3					

2. Uji Normalitas Data

1) Analisis Grafik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2) Uji Kolmogorov Smirnov (One Sample K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.04180711E3
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.046
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.490
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970

a. Test distribution is Normal.

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.791	6382.03441	1.833

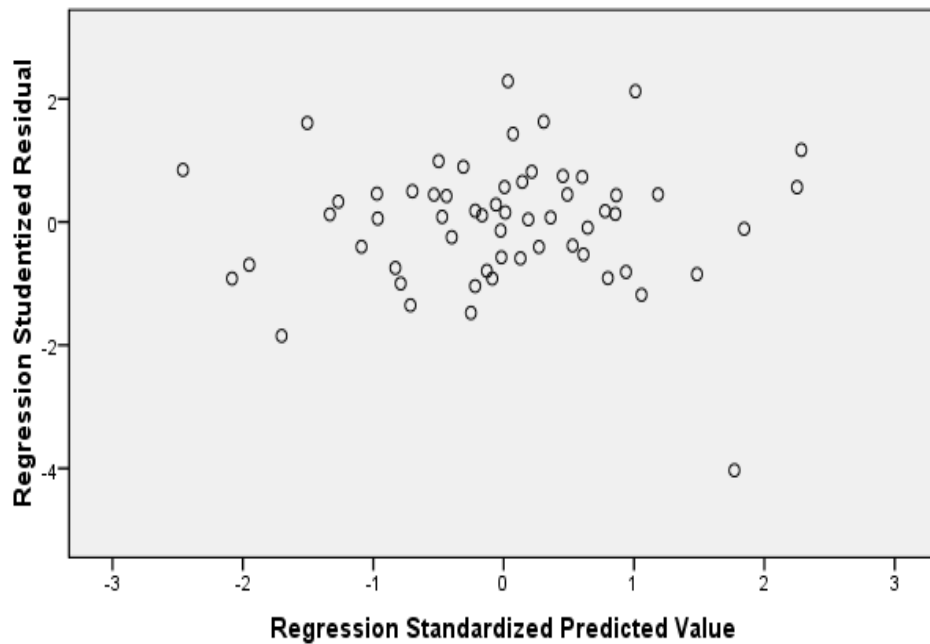
a. Predictors: (Constant), BIRATE, NPF, FDR, OC

b. Dependent Variable: TOTAL ASET

4. Uji Heterosdekastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Unstandardized Residual



5. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-42270.461	23170.089		-1.824	.074
	OC	91.443	8.810	.983	10.379	.000
	FDR	-224.687	429.746	-.039	-.523	.603
	NPF	-11559.375	3529.300	-.230	-3.275	.002
	BIRATE	9270.970	2597.769	.342	3.569	.001

a. Dependent Variable: TOTAL ASET

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.806	.791	6382.03441

a. Predictors: (Constant), BIRATE, NPF, FDR, OC

b. Dependent Variable: TOTAL ASET

7. Uji F Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.119E9	4	2.280E9	55.971	.000 ^a
	Residual	2.199E9	54	4.073E7		
	Total	1.132E10	58			

a. Predictors: (Constant), BIRATE, NPF, FDR, OC

b. Dependent Variable: TOTAL ASET

8. Uji t Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-42270.461	23170.089		-1.824	.074
	OC	91.443	8.810	.983	10.379	.000
	FDR	-224.687	429.746	-.039	-.523	.603
	NPF	-11559.375	3529.300	-.230	-3.275	.002
	BIRATE	9270.970	2597.769	.342	3.569	.001

a. Dependent Variable: TOTAL ASET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Shovia Indah Firdiyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 20 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Bolu RT.001/RW.005 Ds. Jono Tawangharjo,
Grobogan
No. HP : 087736540244
Alamat Email : shoviaindah20@gmail.com

II. PENDIDIKAN

2003-2004 TK Dharma Wanita II Jono
2004-2010 SDN 04 Jono
2010-2013 SMPN 01 Tawangharjo
2013-2016 SMAN 01 Pulokulon
2016-2020 UIN Walisongo Semarang

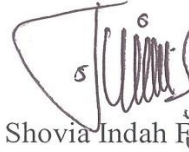
III. LATAR BELAKANG KELUARGA

Ayah : Mundofir
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 31 Desember 1967
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Bolu RT.001/RW.005 Ds. Jono Tawangharjo,
Grobogan
Ibu : Sri Darmanti
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 04 Juni 1979
Agama : Islam

Alamat : Dsn. Bolu RT.001/RW.005 Ds. Jono Tawangharjo,
Grobogan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, serta menurut keadaan yang sebenarnya.

Semarang, 06 Januari 2020



Shovia Indah Firdiyanti